

LKJIP

**Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah**

**TAHUN
2023**



**DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat ini disusun sebagai salah satu perwujudan akuntabilitas atas pelaksanaan visi, misi dan tupoksi yang diembannya kepada publik, yang bersifat tahunan sebagaimana diamanatkan dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Diktum Ketiga Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi Dilingkungan Pemerintah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat ini memuat pencapaian kinerja pelaksanaan program sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat, sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis 2021-2026.

Program dan kegiatan serta Sub Kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bentuk peran serta aktif Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik melalui pelaksanaan kinerja.

Diharapkan apa yang telah dicapai Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat dalam kurun waktu tersebut dapat memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat menjadi cermin bagi kita semua untuk mengevaluasi kinerja organisasi selama tahun 2023 agar dapat melaksanakan kinerja ke depan secara lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Simpang Empat, Januari 2024

Kepala Dinas

ASRI HAMDIL ST

Pembina Tk. 1/ IVb
NIP. 19761123 200501 1 012

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023 merupakan perwujudan suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Secara ringkas dari hasil pengukuran kinerja yang dilakukan menunjukkan keberhasilan kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat dalam mencapai target-target kinerja yang telah ditetapkan. Hal ini ditunjukkan dari data capaian kinerja pada tabel berikut ini.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Capaian Tahun 2023
1	Meningkatnya Cakupan Layanan Program Pengembangan Perumahan Guna Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Bidang Perumahan	Rasio penduduk korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100	100	100.00%
		Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	100	100	100.00%
2	Berkurangnya Rumah Tidak Layak Huni dan Berkurangnya Luas Kawasan Kumuh	Persentase areal kawasan kumuh	3.39%	3.39%	100.00%
		Cakupan ketersediaan rumah layak huni	88,39	88,39	100.00%
3	Tersedianya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk menunjang fungsi hunian	Persentase pengembang yang tersertifikasi	60%	60%	100.00%
		Cakupan lingkungan sehat dan aman yang didukung dengan PSU	0.78	0,63	80,77%
4	Meningkatnya fasilitasi penyelesaian konflik pertanahan	Persentase penyelesaian izin lokasi	100%	100%	100.00%
		Persentase konflik pertanahan difasilitasi	100%	100%	100.00%
		Jumlah fasilitasi ganti rugi tanah	2 Angka	2 Angka	100.00%
5	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Level Maturitas SPIP Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	2,35	3,132	133.28%
		Nilai SAKIP Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	B	BB	100.00%
		Penurunan Temuan BPK dan/atau Inspektort	75%	75%	100.00%
TOTAL					102,77%

Ketercapaian target kinerja Tahun 2023 terhadap sasaran strategis yang telah ditetapkan didukung oleh sumberdaya manusia, ketersediaan anggaran, pengendalian terhadap sumberdaya serta komitmen dalam meningkatkan kinerja instansi.

Upaya yang dilakukan dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dicapai dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkontribusi langsung dalam pencapaian target dari indikator-indikator yang telah ditetapkan.

Namun dalam perjalanannya Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat dalam menjalankan tugas dan fungsi yang diemban mempunyai banyak tantangan dan permasalahan yang harus diselesaikan, dan untuk selanjutnya akan dijelaskan secara rinci dalam dokumen ini.

Tentu saja tingkat pencapaian kinerja yang baik ini akan dipertahankan dan ditingkatkan menjadi semakin baik pada tahun-tahun mendatang. Berbagai permasalahan yang muncul akan dicarikan jalan keluarnya sebagai sebuah tantangan dalam menjalankan tugas dan fungsi yang diemban.

Simpang Empat, Januari 2024

Kepala Dinas


ASRI HAMDIL ST

Pembina Tk. 1/ IVb

NIP. 19761123 200501 1 012

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	
RINGKASAN EKSEKUTIF	
DAFTAR ISI	
DAFTAR TABEL	

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan Laporan	3
1.3 Struktur Organisasi	5
1.4 Tugas Pokok dan Fungsi Instansi	6
1.5 Sumber Daya Manusia Instansi	7
1.6 Aspek Strategis Organisasi	8
1.7 Aspek Sarana dan Prasarana.....	9
1.8 Sistematika Penyajian.....	12

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis	14
2.2 Perjanjian Kinerja	17

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Pencapaian Kinerja Organisasi	21
3.1.1 Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Cakupan Layanan Program Pengembangan Perumahan Guna Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Bidang Perumahan	25
A. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 1 Tahun 2023	26
B. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 Tahun 2023 dengan tahun 2023	26
C. Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 1 sampai dengan Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra	27
D. Analisis penyebab peningkatan/penurunan Kinerja Sasaran Strategis 1 serta alternative solusi yang dilakukan	28
E. Analisis atas Efisiensi Sumber Daya Sasaran Strategis 1	28

F.	Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja Sasaran Strategis 1	28
3.1.2	Sasaran Strategis 2 : Berkurangnya Rumah Tidak Layak Huni dan Berkurangnya Luas Kawasan Kumuh	30
A.	Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 2 Tahun 2023	30
B.	Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2 Tahun 2023 dengan tahun 2022	31
C.	Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 2 sampai dengan Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra	31
D.	Analisis penyebab peningkatan/penurunan Kinerja Sasaran Strategis 2 serta alternative solusi yang dilakukan	32
E.	Analisis atas Efisiensi Sumber Daya Sasaran Strategis 2	32
F.	Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja Sasaran Strategis 2	33
3.1.3	Sasaran Strategis 3 : Tersedianya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk menunjang fungsi hunian Berkurangnya	35
A.	Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 3 Tahun 2023	35
B.	Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3 Tahun 2023 dengan tahun 2022	36
C.	Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 3 sampai dengan Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra	36
D.	Analisis penyebab peningkatan/penurunan Kinerja Sasaran Strategis 3 serta alternative solusi yang dilakukan	37
E.	Analisis atas Efisiensi Sumber Daya Sasaran Strategis 3	37
F.	Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja Sasaran Strategis 3	38
3.1.4	Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya fasilitasi penyelesaian konflik pertanahan	39
A.	Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 4 Tahun 2023	40
B.	Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Sasaran Strategis 4 Tahun 2023 dengan tahun 2022	41
C.	Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 4 sampai dengan Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra	41
D.	Analisis penyebab peningkatan/penurunan Kinerja Sasaran Strategis 4 serta alternative solusi yang dilakukan	42

E.	Analisis atas Efisiensi Sumber Daya Sasaran Strategis 4.....	42
F.	Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja Sasaran Strategis 4.....	42
3.1.4	Sasaran Strategis 5 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertahanan	43
A.	Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 5 Tahun 2023	43
B.	Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Sasaran Strategis 5 Tahun 2023 dengan tahun 2022	44
C.	Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 5 sampai dengan Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra	44
D.	Analisis penyebab peningkatan/penurunan Kinerja Sasaran Strategis 5 serta alternative solusi yang dilakukan	45
E.	Analisis atas Efisiensi Sumber Daya Sasaran Strategis 5	45
F.	Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja Sasaran Strategis 5	45
3.2	Realisasi Anggaran	46

BAB IV PENUTUP

4.1	Kesimpulan.....	52
4.2	Saran.....	52

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Sasaran Strategis	3
Tabel 2. Jumlah Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Golongan	7
Tabel 3. Jumlah Sumber Daya Aparatur Dinas Berdasarkan Pendidikan.....	7
Tabel 4. Daftar Aset Tetap Peralatan dan Mesin Per – 31 Desember 2023	9
Tabel 5. Tujuan dan Sasaran Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan....	14
Tabel 6. Indikator Kinerja Utama	15
Tabel 7. Kebijakan dan Program.....	16
Tabel 8. Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2023	19
Tabel 9. Penetapan Kinerja Tahun Anggaran 2023	20
Tabel 11. Skala dan Kategori Penilaian Capaian Kinerja.....	21
Tabel 12. Hasil Pengukuran Kinerja Barat Tahun 2023	22
Tabel 13. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2023.....	23
Tabel 14. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Renstra.....	24
Tabel 15. Analisis Atas Efisiensi Pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Pada Tahun 2023	25
Tabel 16. Perbandingan Target dan Realisasi Sasaran Strategis 1 Tahun 2023	26
Tabel 17. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 Tahun 2023 dengan tahun 2022.....	27
Tabel 18. Perbandingan Realisasi Sasaran Strategis 1 sampai dengan Tahun 2022 dengan Target jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Renstra	27
Tabel 19. Tingkat Efisiensi Sasaran Strategis 1	28
Tabel 20. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 2 Tahun 2023	31
Tabel 21. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2 Tahun 2023 dengan tahun 2022	31
Tabel 22. Perbandingan Realisasi Sasaran Strategis 2 sampai dengan Tahun 2023 dengan Target jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Renstra	32
Tabel 23. Tingkat Efisiensi Sasaran Strategis 2	33
Tabel 24. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 3 Tahun 2023	36
Tabel 25. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3 Tahun 2023 dengan tahun 2022	36
Tabel 26. Perbandingan Realisasi Sasaran Strategis 3 sampai dengan Tahun 2023 dengan Target jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Renstra	37

Tabel 27. Tingkat Efisiensi Sasaran Strategis 3	37
Tabel 28. Meningkatnya fasilitasi penyelesaian konflik pertanahan	40
Tabel 29. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Sasaran Strategis 4 Tahun 2023 dengan tahun 2022	40
Tabel 30. Perbandingan Realisasi Sasaran Strategis 4 sampai dengan Tahun 2023 dengan Target jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Renstra	41
Tabel 31. Tingkat Efisiensi Sasaran Strategis 4	41
Tabel 32. Realisasi Anggaran Pada Tahun 2023	43
Tabel 33. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Sasaran Strategis 5 Tahun 2023 dengan tahun 2022	43
Tabel 34. Perbandingan Realisasi Sasaran Strategis 5 sampai dengan Tahun 2023 dengan Target jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Renstra	45
Tabel 35. Tingkat Efisiensi Sasaran Strategis 5	45
Tabel 36. Realisasi Anggaran Pada Tahun 2023	48

DAFTAR GAMBAR

Gamba 1.1. Struktur Organisasi

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam kerangka mewujudkan cita-cita bernegara sesuai dengan konstitusi negara Republik Indonesia setiap penyelenggara pemerintahan, baik Pusat maupun Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota), wajib menyelenggarakan pemerintahan yang baik. Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik diperlukan suatu sistem yang dapat menunjang pelaksanaannya, sistem tersebut dikenal dengan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sistem ini mencakup Perencanaan Strategis, Perencanaan Kinerja, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja.

Penyusunan SAKIP didasarkan pada Tap MPR RI Nomor XI/MPR/1998 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggung-jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan mengelola sumber daya yang dimilikinya. Pertanggungjawaban tersebut disajikan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Penyusunan LKjIP Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selain itu, penyusunan LKIP mengacu pada dokumen Perencanaan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026, Rencana Kerja Tahun 2023, Perjanjian Kinerja Tahun 2023 serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD Tahun 2022.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat tahun 2023 dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat adalah sebagai sarana bagi Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat dalam menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh pemangku kepentingan (Bupati Kabupaten Pasaman Barat, DPRD Kabupaten Pasaman Barat dan masyarakat) atas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan pengelolaan sumberdaya yang telah dipercayakan kepada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat. Selain sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja, LKjIP diharapkan dapat bermanfaat dalam rangka :

1. Mendorong Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat untuk dapat melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar, yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat di seluruh Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat dan Kabupaten Pasaman Barat;
2. Menjadikan Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat yang akuntabel, sehingga dapat berperan secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan yang tentram, tertib, dan kondusif;
3. Menjadikan masukan dan umpan balik dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat guna membantu pelayanan kepada masyarakat lebih baik;
4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat di Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat dan Kabupaten Pasaman Barat terhadap penyelenggara Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat.

Penyusunan LKjIP Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023 dimaksudkan untuk menyajikan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat dalam satu tahun anggaran yang terdapat dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026. IKU Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat berkaitan langsung dengan Misi yang ada di RPJMD Kabupaten Pasaman Barat maupun Sasaran yang ada pada Renstra Dinas Perumahan,

Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

Tabel 1.
Sasaran Strategis

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
1	Meningkatnya Cakupan Layanan Program Pengembangan Perumahan Guna Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Bidang Perumahan	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota
		Rasio penduduk korban bencana yang memperoleh rumah layak huni
2	Berkurangnya Rumah Tidak Layak Huni dan Berkurangnya Luas Kawasan Kumuh	Persentase areal kawasan kumuh
		Cakupan ketersediaan rumah layak huni
3	Tersedianya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk menunjang fungsi hunian	Cakupan Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU
		Persentase pengembang yang tersertifikasi
4	Meningkatnya Fasilitasi Penyelesaian Konflik Pertanahan	Penyelesaian izin lokasi (%)
		Persentase Konflik Pertanahan Difasilitasi
		Jumlah Fasilitasi ganti rugi tanah
5	Meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	Level Maturitas SPIP Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
		Nilai SAKIP Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
		Indeks Kepuasan Masyarakat

Sumber: Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan

Berdasarkan latar belakang diatas, untuk melakukan pembahasan lebih lanjut secara komprehensif mengenai kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat pada Tahun 2023 sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah dibuat, akan kami bahas pada BAB III (AKUNTABILITAS KINERJA) pada Laporan Kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023 ini.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan Laporan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023 ini didasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Instruksi Presiden Nomor 07 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/Prt/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2005 – 2025;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 18 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2011-2031;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
19. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
20. Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor 188.45/729/BUP-PASBAR/2021 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kabupaten Pasaman Barat.

1.3 Struktur Organisasi

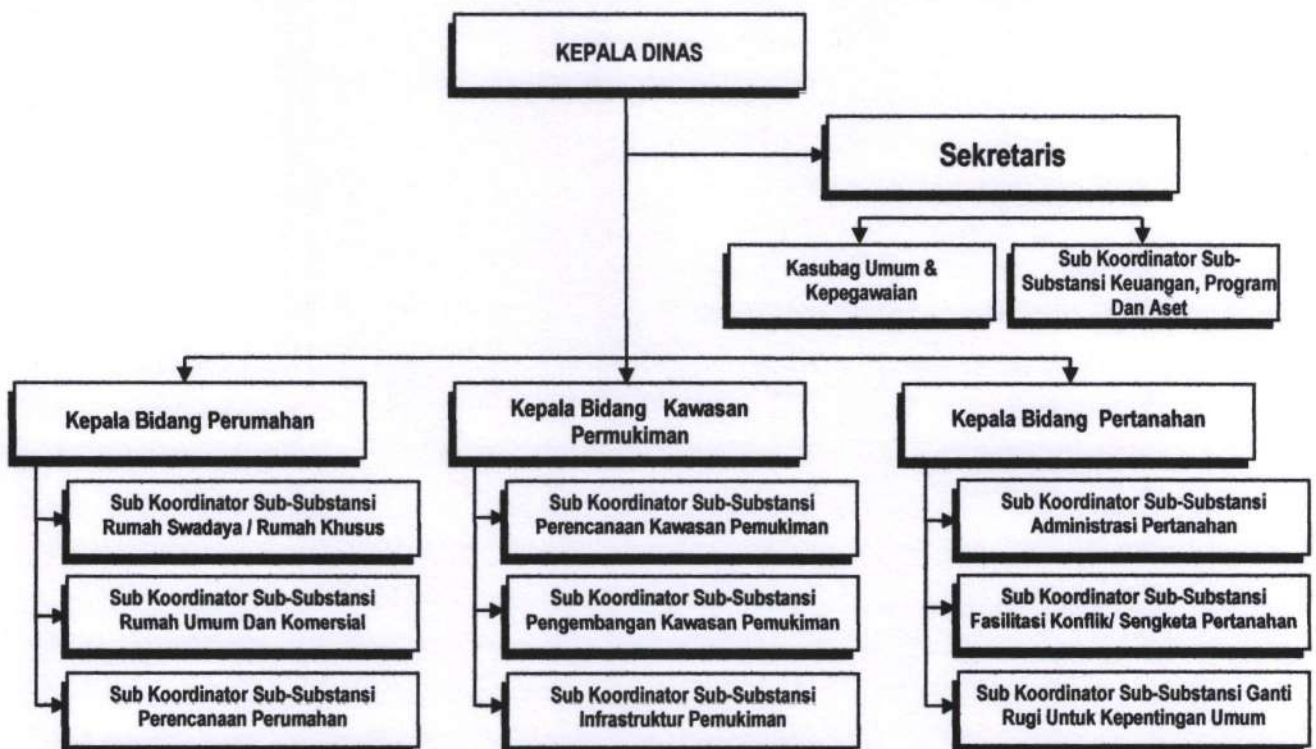
Struktur organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2022 perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Nomor 73 tahun 2022 dengan susunan organisasi sebagai berikut :

Kepala Dinas	: Asri Hamdi, ST
Sekretaris	: Eli Martona, Si. Msi.
- Kasubag Umum & Kepegawaian	: Sahid, ST
- Sub Koordinator Sub-Substansi Keuangan, Program Dan Aset	: Mudirman, SE
Kepala Bidang Pertanahan	: Ade Putra, SE.
- Sub Koordinator Sub-Substansi Administrasi Pertanahan	: -
- Sub Koordinator Sub-Substansi Fasilitasi Konflik/ Sengketa Pertanahan	: -
- Sub Koordinator Sub-Substansi Ganti Rugi Untuk Kepentingan Umum	: -
Kepala Bidang Kawasan Pemukiman	: Fajri Rozehan, SH.
- Sub Koordinator Sub-Substansi Perencanaan Kawasan	: -

- Pemukiman
- Sub Koordinator Sub-Substansi Pengembangan Kawasan : -
 - Sub Koordinator Sub-Substansi Infrastruktur Pemukiman : **Zakial Himmi, ST**
- Kepala Bidang Perumahan** : **Yuli Asra, SE. MM.**
- Sub Koordinator Sub-Substansi Rumah Swadaya / Rumah Khusus : -
 - Sub Koordinator Sub-Substansi Rumah Umum Dan Komersial : **Popi Jasmiati, ST**
 - Sub Koordinator Sub-Substansi Perencanaan Perumahan : -

Secara lengkap bagan struktur organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat dapat terlihat pada Gambar berikut :

Gambar 1.
Strutur Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan



1.4 Tugas Pokok dan Fungsi Instansi

Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman mempunyai tugas pokok melaksanakan Urusan Pemerintah Konkuren Wajib Pelayanan dasar Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman yang menjadi kewenangan Kabupaten mempunyai fungsi adalah :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman ;
2. Penyelenggaraan urusan Pemerintah dan Pelayanan umum di bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman ;

3. Perencanaan, Pelaksanaan dan Pembinaan tugas dibidang Urusan Perumahan dan Kawasan Pemukiman meliputi urusan bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman meliputi urusan dibidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan;
4. Melaksanakan percepatan pembangunan Infrastruktur di Daerah tertinggal dan terisolir;
5. Pengelolaan Urusan Ketatausahaan Dinas meliputi Umum dan Kepegawaian, Program, Aset dan Keuangan;
6. Pelaksanaan Tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah kepada pemerintah daerah dibidang perumahan dan Kawasan Pemukiman serta pertanahan sesuai dengan fungsinya;
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.5 Sumber Daya Manusia Instansi

Jumlah sumber daya aparatur Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman keadaan pada tanggal 1 Januari 2022 adalah sebanyak 35 orang dan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebanyak 59 orang dengan golongan sebagai berikut :

Tabel 2.
Jumlah Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Golongan

Golongan (Pegawai Negeri/Honor)	Keadaan 1 Januari 2023 (orang)	Keadaan 31 Desember 2023 (orang)
IV	6	6
III	14	14
II	6	4
I	-	-
PTT	4	4
THL	29	24
Jumlah	59	52

Tabel 3.
Jumlah Sumber Daya Aparatur Dinas Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan	Keadaan 1 Januari 2023 (orang)	Keadaan 31 Desember 2023 (orang)
S3	-	-
S2	3	4
S1	31	30
D III	8	7
D II	-	-
D I	-	-
SLTA	19	11
SLTP	-	-
SD	-	-
Jumlah	59	52

1.6 Aspek Strategis Organisasi

Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat mempunyai tugas melaksanakan urusan bupati yang menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berupa urusan pemerintahan bidang perumahan dan Kawasan Pemukiman dan juga urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar berupa urusan bidang pertanahan, serta menyelenggarakan enam fungsi utama, yaitu:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perumahan dan Kawasan Pemukiman ;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perumahan dan Kawasan Pemukiman ;
- c. Perencanaan, pelaksanaan dan pembinaan tugas di bidang urusan perumahan dan Kawasan Pemukiman meliputi urusan bidang perumahan dan Kawasan Pemukiman dan pertanahan;
- d. Pengelolaan urusan ketatausahaan dinas meliputi umum dan kepegawaian, program, aset dan keuangan;
- e. Pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah kepada pemerintah daerah di bidang perumahan dan Kawasan Pemukiman serta pertanahan sesuai dengan fungsinya;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman , diidentifikasi permasalahan pembangunan sebagai berikut :

1. Belum tersedianya data dan dokumen perencanaan sektor perumahan, Kawasan Pemukiman dan pertanahan
2. Harga lahan di kawasan perkotaan tinggi sehingga tidak terjangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah
3. Perizinan pembangunana perumahan terkoordinir dengan baik
4. Belum terintegrasinya pembangunan perumahan dan infrastruktur
5. Target pendanaan perlu disesuaikan agar kinerja yang berkaitan dengan penanganan urusan wajib dapat dicapai
6. Belum adanya DED kawasan kumuh yang menjadi kewenangan kabupaten (< 10 hektar)
7. Belum lengkapnya data PSU (Prasarana, Sarana, Umum).
8. Masih tingginya intensitas konflik dan sengketa pertanahan .
9. Masih banyaknya tanah yang belum terdaftar.
10. Masih banyaknya tanah yang dimiliki secara komunal yang diatur secara adat.

1.7 Aspek Sarana dan Prasarana

Dalam penyelenggaraan pelaksanaan program kegiatan terutama dalam penataan kawasan perumahan dan permukiman, pelaksanaan pembangunan gedung-gedung strategis, dan pengadaan lahan untuk kepentingan pemerintah, aspek sarana dan prasarana mempunyai peranan penting sebagai berikut :

- 1) Kelengkapan sarana pendukung perencanaan dan pelaksanaan kerja;
- 2) Kenyamanan ruangan;
- 3) Fungsi Ruang;
- 4) Keselamatan kerja.

Adapun daftar aset tetap peralatan dan mesin serta gedung kantor yang berada di Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kota Bekasi adalah sebagai berikut:

Tabel 4.

**Daftar Aset Tetap Peralatan dan Mesin Per – 31 Desember 2022
Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan**

No	Kode barang	Nama / Jenis Barang	Tahun Pembelian	Harga
1	02.02.03.04.002	Portable Generating Set	2018	15,000,000
2	02.03.01.01.004	Kendaraan Dinas Bermotor Lain-lain	2009	229,900,000
3	02.03.01.02.003	Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	2011	182,175,000
4	02.03.01.03.002	Pick Up	2008	110,000,000
5	02.03.01.04.022	Kendaraan Bermotor Khusus Lain-lain	2008	336,000,000
6	02.03.01.05.001	Sepeda Motor	2005	12,500,000
7	02.03.01.05.001	Sepeda Motor	2005	8,500,000
8	02.03.01.05.001	Sepeda Motor	2006	12,500,000
9	02.03.01.05.001	Sepeda Motor	2006	13,500,000
10	02.03.01.05.001	Sepeda Motor	2007	18,920,000
11	02.03.01.05.001	Sepeda Motor	2013	24,250,000
12	02.03.01.05.001	Sepeda Motor	2018	36,070,000
13	02.03.01.05.001	Sepeda Motor	2018	36,070,000
14	02.03.01.05.001	Sepeda Motor	2018	36,070,000
15	02.03.01.05.001	Sepeda Motor	2018	36,070,000
16	02.03.01.05.002	Scooter	2017	18,325,775
17	02.03.01.05.002	Scooter	2017	18,325,775
18	02.03.01.05.002	Scooter	2018	18,174,000
19	02.03.01.05.002	Scooter	2018	18,174,000
20	02.03.01.05.002	Scooter	2018	18,174,000
21	02.03.01.05.002	Scooter	2018	18,174,000
22	02.03.02.01.002	Gerobak Dorong	2019	700,000
23	02.04.03.01.071	Global Positioning System	2018	11,360,000
24	02.04.03.01.071	Global Positioning System	2018	11,360,000

No	Kode barang	Nama / Jenis Barang	Tahun Pembelian	Harga
25	02.04.03.01.071	Global Positioning System	2018	11,360,000
26	02.04.03.01.071	Global Positioning System	2018	11,360,000
27	02.05.02.01.007	Penyemprot Tangan (Hand Sprayer)	2019	1,000,000
28	02.06.01.01.002	Mesin Ketik Manual Standar (14-16)	2009	3,916,667
29	02.06.01.02.009	Mesin Absen (Time Recorder)	2017	4,500,000
30	02.06.01.02.009	Mesin Absen (Time Recorder)	2018	7,780,000
31	02.06.01.04.001	Lemari Besi	2019	15,000,000
32	02.06.01.05.007	Papan Pengumuman	2013	2,500,000
33	02.06.01.05.007	Papan Pengumuman	2013	2,500,000
34	02.06.01.05.007	Papan Pengumuman	2013	2,500,000
35	02.06.02.01.001	Lemari Kayu	2017	12,000,000
36	02.06.02.01.001	Lemari Kayu	2017	29,850,000
37	02.06.02.01.005	Kursi Besi/Metal	2017	5,000,000
38	02.06.02.04.001	Lemari Es	2019	4,950,000
39	02.06.02.04.003	AC Unit	2017	5,000,000
40	02.06.02.04.003	AC Unit	2017	5,000,000
41	02.06.02.04.003	AC Unit	2017	5,000,000
42	02.06.02.04.003	AC Unit	2017	5,000,000
43	02.06.02.04.003	AC Unit	2017	5,000,000
44	02.06.02.04.003	AC Unit	2019	4,500,000
45	02.06.02.04.003	AC Unit	2019	4,500,000
46	02.06.02.04.003	AC Unit	2019	4,500,000
47	02.06.02.04.006	Kipas Angin	2017	1,500,000
48	02.06.02.04.006	Kipas Angin	2017	3,000,000
49	02.06.02.06.003	Televisi	2018	5,000,000
50	02.06.02.06.021	Camera Video	2019	4,410,000
51	02.06.02.06.021	Camera Video	2019	8,525,000
52	02.06.02.06.021	Camera Video	2019	4,420,000
53	02.06.02.06.021	Camera Video	2019	5,150,000
54	02.06.02.06.021	Camera Video	2019	2,500,000
55	02.06.02.06.021	Camera Video	2019	9,148,000
56	02.06.02.06.050	Alat Rumah Tangga Lain-lain	2017	25,000,000
57	02.06.02.06.050	Alat Rumah Tangga Lain-lain	2018	15,000,000
58	02.06.02.06.050	Alat Rumah Tangga Lain-lain	2019	6,900,000
59	02.06.02.07.001	Alat Pemadam Portable	2017	2,000,000
60	02.06.03.02.001	P.C Unit	2017	7,350,000
61	02.06.03.02.001	P.C Unit	2017	7,350,000
62	02.06.03.02.001	P.C Unit	2017	7,350,000
63	02.06.03.02.001	P.C Unit	2017	7,350,000
64	02.06.03.02.001	P.C Unit	2017	8,085,000
65	02.06.03.02.001	P.C Unit	2017	8,085,000
66	02.06.03.02.001	P.C Unit	2017	8,085,000
67	02.06.03.02.001	P.C Unit	2017	8,085,000
68	02.06.03.02.001	P.C Unit	2017	8,085,000
69	02.06.03.02.001	P.C Unit	2017	6,750,000

No	Kode barang	Nama / Jenis Barang	Tahun Pembelian	Harga
70	02.06.03.02.001	P.C Unit	2018	9,000,000
71	02.06.03.02.001	P.C Unit	2018	9,000,000
72	02.06.03.02.001	P.C Unit	2018	9,000,000
73	02.06.03.02.001	P.C Unit	2018	9,000,000
74	02.06.03.02.001	P.C Unit	2018	12,430,000
75	02.06.03.02.001	P.C Unit	2018	12,430,000
76	02.06.03.02.001	P.C Unit	2018	12,430,000
77	02.06.03.02.001	P.C Unit	2018	12,430,000
78	02.06.03.02.002	Lap Top	2014	8,000,000
79	02.06.03.02.002	Lap Top	2014	15,000,000
80	02.06.03.02.002	Lap Top	2015	13,000,000
81	02.06.03.02.002	Lap Top	2017	6,550,000
82	02.06.03.02.002	Lap Top	2017	6,550,000
83	02.06.03.02.002	Lap Top	2017	7,950,000
84	02.06.03.02.002	Lap Top	2017	7,950,000
85	02.06.03.02.002	Lap Top	2017	7,950,000
86	02.06.03.02.002	Lap Top	2017	7,950,000
87	02.06.03.02.002	Lap Top	2017	7,950,000
88	02.06.03.02.002	Lap Top	2017	7,950,000
89	02.06.03.02.002	Lap Top	2018	20,000,000
90	02.06.03.02.002	Lap Top	2018	20,000,000
91	02.06.03.02.002	Lap Top	2018	24,000,000
92	02.06.03.04.008	Printer	2017	2,200,000
93	02.06.03.04.008	Printer	2017	2,200,000
94	02.06.03.04.008	Printer	2017	975,000
95	02.06.03.04.008	Printer	2017	975,000
96	02.06.03.04.008	Printer	2017	975,000
97	02.06.03.04.008	Printer	2017	975,000
98	02.06.03.04.008	Printer	2017	975,000
99	02.06.03.04.008	Printer	2017	975,000
100	02.06.03.04.008	Printer	2018	3,500,000
101	02.06.03.04.008	Printer	2018	3,500,000
102	02.06.03.04.008	Printer	2018	6,000,000
103	02.06.03.04.008	Printer	2018	6,000,000
104	02.06.03.04.008	Printer	2018	6,000,000
105	02.06.03.04.008	Printer	2018	1,000,000
106	02.06.03.04.008	Printer	2018	1,000,000
107	02.06.03.04.008	Printer	2018	1,000,000
108	02.06.03.04.008	Printer	2018	1,000,000
109	02.06.03.04.008	Printer	2018	2,500,000
110	02.06.03.04.008	Printer	2018	2,500,000
111	02.06.03.04.008	Printer	2018	2,500,000
112	02.06.03.04.008	Printer	2018	2,500,000
113	02.06.03.04.008	Printer	2018	2,500,000
114	02.06.03.04.008	Printer	2019	1,500,000

No	Kode barang	Nama / Jenis Barang	Tahun Pembelian	Harga
115	02.06.03.04.008	Printer	2019	1,500,000
116	02.06.03.04.008	Printer	2019	1,500,000
117	02.06.03.04.008	Printer	2019	1,500,000
118	02.06.03.04.008	Printer	2019	1,500,000
119	02.06.03.04.008	Printer	2019	1,500,000
120	02.06.03.04.008	Printer	2019	1,500,000
121	02.06.03.04.008	Printer	2019	1,500,000
122	02.06.03.04.008	Printer	2019	1,500,000
123	02.06.03.04.008	Printer	2019	1,500,000
124	02.06.03.06.004	Modem	2018	3,020,000
125	02.07.01.01.003	Proyektor + Attachment	2018	15,000,000
126	02.07.02.06.002	Wireless Amplifier	2018	8,000,000
127	1.3.2.10.002.002.009	SCANNER	2022	15,640,000
128	1.3.2.10.002.002.009	SCANNER	2022	15,640,000
129	1.3.2.10.002.001.002	Lap Top	2023	23.000.000
130	1.3.2.10.002.001.002	Lap Top	2023	23.000.000
131	1.3.2.10.002.001.001	P.C Unit	2023	19.353.950
132	1.3.2.10.002.001.001	P.C Unit	2023	19.353.950
133	1.3.2.10.002.001.001	P.C Unit	2023	19.353.950
134	1.3.2.10.002.001.001	P.C Unit	2023	19.353.950
135	1.3.2.10.002.001.001	P.C Unit	2023	19.353.950

Sumber: Kartu Inventaris Barang

1.8 Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Menjelaskan secara ringkas tentang Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Pasaman Barat, latar belakang, maksud dan tujuan, serta gambaran, Aspek strategis Organisasi dan sistematika penyajian.

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

Menjelaskan secara ringkas tentang Perencanaan Kinerja dan juga Perjanjian Kinerja tahun 2022.

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

Menjelaskan hasil pengukuran kinerja yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2022, evaluasi dan analisi capaian kinerja dimaksud. Dan juga menjelaskan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja.

BAB IV : PENUTUP

Berisikan kesimpulan umum atas capaian kinerja Tahun 2022 dan langkah-langkah atau saran-saran yang akan dilaksanakan di masa yang akan datang untuk peningkatan kinerja.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat mempunyai Rencana Strategis (Renstra) yang berorientasi pada pengeluaran (output) dan hasil (out comes) yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu untuk tahun 2021-2026 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat mencakup visi, misi, tujuan, sasaran serta strategi atau cara mencapai tujuan dan sasaran.

Berdasarkan pada hal tersebut diatas, misi Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat mengacu kepada visi Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat yaitu :

” Mewujudkan Pasaman Barat yang Bermartabat, Agamais, Maju, dan Sejahtera ”

Misi yang akan menjadi tanggung jawab Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat adalah :

- Misi Pertama : **Membangun sumber daya manusia yang beriman dan bertaqwa, berbudaya, dan berdaya saing.**
- Misi Kedua : **Mewujudkan perekonomian yang tangguh, berdaya saing, dan inklusif.**

Dengan pernyataan misi tersebut diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang melaksanakan program kegiatan sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.

2.1.1. Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan visi dan misi di atas, ditetapkan 3 (tiga) tujuan dan 5 (lima) sasaran strategis pembangunan Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat seperti pada tabel di halaman berikut :

Tabel 5.
Tujuan dan Sasaran Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan

No.	Tujuan	No.	Sasaran Strategis
1.	Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	1.	Meningkatnya Cakupan Layanan Program Pengembangan Perumahan Guna Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Bidang Perumahan
		2.	Berkurangnya Rumah Tidak Layak Huni dan Berkurangnya Luas Kawasan Kumuh
		3.	Tersedianya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk menunjang fungsi hunian
2.	Pemenuhan penyelesaian konflik pertanahan	4.	Meningkatnya Fasilitasi Penyelesaian Konflik Pertanahan
3.	Meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	5.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Sumber: Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan

2.1.2 Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Instansi Pemerintah. IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat juga telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) secara berjenjang, sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan IKU telah mengacu pada Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat serta RPJMD tahun 2021-2026 dan sesuai dengan Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor 100.3.3.2/880/BUP-PASBAR/2023 Tahun 2023 tentang Perubahan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 6.
Indikator Kinerja Utama

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Defenisi Operasional
1	Meningkatkan Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persentase Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Berkualitas	$\frac{\text{Jumlah Perumahan dan Kawasan Permukiman yang berkualitas}}{\text{Jumlah Perumahan dan Kawasan Permukiman}} \times 100\%$
	1.1 Meningkatnya Cakupan Layanan Program Pengembangan Perumahan guna Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dibidang Perumahan	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	$\frac{\text{Jumlah rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten yang dibangun}}{\text{Jumlah kebutuhan rumah layak huni bagi masyarakat yang terdampak relokasi program pemerintah kabupaten}} \times 100\%$
		Rasio penduduk korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	$\frac{\text{Jumlah penduduk korban bencana yang memperoleh rumah layak huni}}{\text{Jumlah penduduk korban bencana}} \times 100\%$
	1.2 Berkurangnya Rumah Tidak Layak Huni dan Berkurangnya Luas Kawasan Kumuh	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	$\frac{\text{Jumlah rumah layak huni}}{\text{Jumlah seluruh rumah yang ada di wilayah Kabupaten}} \times 100\%$
		Persentase areal kawasan kumuh	$\frac{\text{Luas Kawasan Kumuh}}{\text{Luas Wilayah}} \times 100\%$
	1.3 Tersedianya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk menunjang fungsi hunian	Cakupan Lingkungan yang sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	$\frac{\text{Luasan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU}}{\text{Total luasan permukiman}} \times 100\%$
		Persentase pengembang yang tersertifikasi	$\frac{\text{Jumlah pengembang yang tersertifikasi}}{\text{Total Jumlah Pengembang}} \times 100\%$
2	Fasilitasi Penanganan Konflik dan Sengketa Pertanahan	Persentase konflik pertanahan difasilitasi	$\frac{\text{Jumlah Konflik Pertanahan Yang Difasilitasi}}{\text{Jumlah Konflik Pertanahan}} \times 100\%$
	2.1 Meningkatnya Penyelesaian Urusan Pertanahan	Jumlah Fasilitasi ganti rugi tanah	Angka Mutlak (Jumlah Fasilitasi ganti rugi tanah dalam satu tahun anggaran)
		Penyelesaian izin lokasi (%)	$\frac{\text{Jumlah Izin Lokasi}}{\text{Jumlah Permohonan Izin Lokasi}} \times 100\%$
3	Meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Level Maturitas SPIP Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Hasil Penilaian BPKP/ Inspektorat
		Nilai SAKIP Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Nilai berdasarkan LHE SAKIP OPD oleh Inspektorat
	3.1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Hasil perhitungan survey
		Level Maturitas SPIP Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Hasil Penilaian BPKP/ Inspektorat
		Nilai SAKIP Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Nilai berdasarkan LHE SAKIP OPD oleh Inspektorat

Sumber: Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

2.2 Perjanjian Kinerja

Dokumen Renstra selanjutnya dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Tahunan (Renja) yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran. Selanjutnya renja tersebut dijadikan acuan dalam penyusunan perjanjian kinerja. Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus Perjanjian Kinerja antara lain untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah selain itu dapat pula digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023 merupakan target kinerja tahun kedua dari Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat 2021-2026, yang memuat sasaran strategis Indikator Kinerja yang terkait dengan tugas fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat. Berikut adalah Kebijakan dan Program Kinerja untuk mendukung tercapainya sasaran beserta Alokasi Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2023 :

Tabel 7.
Kebijakan dan Program

No.	Kebijakan	No.	Program
1.	Pengentasan kemiskinan dan penanganan stunting	1.	Program Pengembangan Perumahan
		2.	Program Kawasan Pemukiman
		3.	Program Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kumuh
		4.	Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)
		5.	Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman
2.	Menyediakan fasilitasi dan mediator untuk penyelesaian konflik pertanahan	6.	Program Pengelolaan Izin Lokasi
		7.	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
		8.	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan
3.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	9.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Sumber: Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan

Untuk dapat menyelesaikan tanggung jawab Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat telah disusun anggaran, sebagai berikut :

Tabel 8.
Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2023

No	Program	Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Awal	Perubahan	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.800.534.203	3.736.150.130	
2	Program Pengembangan Perumahan	27.091.254.400	686.767.000	
3	Program Kawasan Pemukiman	1.153.347.500	2.879.423.000	
4	Program Perumahan Dan Kawasan Pemukiman Kumuh	1.756.608.000	2.044.523.000	
5	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	488.826.124	2.571.174.627	
6	Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	25.050.000	25.050.000	
7	Program Pengelolaan Izin Lokasi	22.866.000	27.321.000	
8	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	96.173.500	118.437.500	
9	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	35.973.000	49.635.500	
Total		34.470.632.727	12.138.481.757	

Sumber : Data olahan Fungsional Perencana

Dengan berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Pasaman Barat tahun 2021-2026, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 dan Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026 serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2023, maka ditetapkan Dokumen Penetapan Kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat tahun 2023. Pada tabel berikut akan disajikan Dokumen Penetapan

Kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023.

Tabel 9.
Penetapan Kinerja Tahun Anggaran 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2023
1	Meningkatnya Cakupan Layanan Program Pengembangan Perumahan Guna Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Bidang Perumahan	Rasio penduduk korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100
		Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	100
2	Berkurangnya Rumah Tidak Layak Huni dan Berkurangnya Luas Kawasan Kumuh	Persentase areal kawasan kumuh	3.39%
		Cakupan ketersediaan rumah layak huni	88,57
3	Tersedianya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk menunjang fungsi hunian	Persentase pengembang yang tersertifikasi	60%
		Cakupan lingkungan sehat dan aman yang didukung dengan PSU	0.59
4	Meningkatnya fasilitasi penyelesaian konflik pertanahan	Persentase penyelesaian izin lokasi	100%
		Persentase konflik pertanahan difasilitasi	100%
		Jumlah fasilitasi ganti rugi tanah	9 Angka
5	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Level Maturitas SPIP Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	2,35
		Nilai SAKIP Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	B
		Penurunan Temuan BPK dan/atau Inspektort	75%

Sumber : Renstra OPD

Setelah dilaksanakan anggaran tahun 2023 sampai dengan bulan Agustus 2023, didapat keadaan bahwa beberapa target kinerja yang telah ditetapkan tidak bisa dicapai, maka pada saat perubahan anggaran 2023 juga dilakukan penyesuaian terhadap Penetapan Kinerja yang sesuai dengan Anggaran Perubahan Tahun 2023, Penetapan Kinerja Perubahan adalah sebagai berikut :

Tabel 10.
Penetapan Kinerja Tahun Anggaran 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2023
1	Meningkatnya Cakupan Layanan Program Pengembangan Perumahan Guna Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Bidang Perumahan	Rasio penduduk korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100
		Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	100
2	Berkurangnya Rumah Tidak Layak Huni dan Berkurangnya Luas Kawasan Kumuh	Persentase areal kawasan kumuh	3.39%
		Cakupan ketersediaan rumah layak huni	88,39
3	Tersedianya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk menunjang fungsi hunian	Persentase pengembang yang tersertifikasi	60%
		Cakupan lingkungan sehat dan aman yang didukung dengan PSU	0.59
4	Meningkatnya fasilitasi penyelesaian konflik pertanahan	Persentase penyelesaian izin lokasi	100%
		Persentase konflik pertanahan difasilitasi	100%
		Jumlah fasilitasi ganti rugi tanah	2 Angka
5	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Level Maturitas SPIP Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	2,35
		Nilai SAKIP Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	B
		Penurunan Temuan BPK dan/atau Inspektort	75%

Sumber : Renstra OPD

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Pencapaian Kinerja Organisasi

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan PP 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya.

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Tabel 11.
Skala dan Kategori Penilaian Capaian Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$\geq 90,1 \%$	Sangat Tinggi
2	$\geq 75,1\% \text{ s/d } 90\%$	Tinggi
3	$\geq 65,1\% \text{ s/d } 75\%$	Sedang
4	$\geq 50,1\% \text{ s/d } 65\%$	Rendah
5	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator outcomes atau minimal outputs dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Adapun Pengukuran Kinerja menggunakan rumus sebagai berikut :

1. Apabila semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendahnya realisasi akan menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Realisasi Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendahnya realisasi akan menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\{ \text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target}) \}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 12 indikator kinerja Tahun 2023, disimpulkan bahwa capaiannya berkriteria **Sangat Tinggi**, dengan rata-rata capaian sebesar **102,77%**.

Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut :

Tabel 12.
Hasil Pengukuran Kinerja Barat Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Capaian Tahun 2023
1	Meningkatnya Cakupan Layanan Program Pengembangan Perumahan Guna Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Bidang Perumahan	Rasio penduduk korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100	100	100.00%
		Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	100	100	100.00%
2	Berkurangnya Rumah Tidak Layak Huni dan Berkurangnya Luas Kawasan Kumuh	Persentase areal kawasan kumuh	3.39%	3.39%	100.00%
		Cakupan ketersediaan rumah layak huni	88,39	88,39	100.00%
3	Tersedianya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk menunjang fungsi hunian	Persentase pengembang yang tersertifikasi	60%	60%	100.00%
		Cakupan lingkungan sehat dan aman yang didukung dengan PSU	0.78	0,63	80,77%
4	Meningkatnya fasilitasi penyelesaian konflik pertanahan	Persentase penyelesaian izin lokasi	100%	100%	100.00%
		Persentase konflik pertanahan difasilitasi	100%	100%	100.00%
		Jumlah fasilitasi ganti rugi tanah	2 Angka	2 Angka	100.00%
5	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Level Maturitas SPIP Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	2,35	3,132	133.28%
		Nilai SAKIP Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	B	BB	100.00%
		Penurunan Temuan BPK dan/atau Inspektort	75%	75%	100.00%
TOTAL					102,77%

Sumber: Data olahan Fungsional Perencana

Perbandingan data kinerja antara realisasi tahun 2023 dengan tahun sebelumnya bertujuan untuk melihat kemajuan dan kemunduran kinerja pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan guna mengetahui perlu dilakukan analisis kecenderungan kinerja suatu instansi apakah meningkat atau menurun.

Tabel 13.
Perbandingan Realisasi Kinerja
Tahun 2022 dan Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2022			Tahun 2023			Perbandingan		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya Cakupan Layanan Program Pengembangan Perumahan Guna Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Bidang Perumahan	Rasio penduduk korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100	100	100	100	100	100.00%	100	100	100
		Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	100	100	100	100	100	100.00%	100	100	100
2	Berkurangnya Rumah Tidak Layak Huni dan Berkurangnya Luas Kawasan Kumuh	Persentase areal kawasan kumuh	3.68%	3.68%	100	3.39%	3.39%	100.00%	-0,56	-0,56	0
		Cakupan ketersediaan rumah layak huni	87,79	87,79	100	88,39	88,39	100.00%	2,25	2,25	0
3	Tersedianya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk menunjang fungsi hunian	Persentase pengembang yang tersertifikasi	60%	0	0.00	60%	60%	100.00%	0,1	-0,5	-100
		Cakupan lingkungan sehat dan aman yang didukung dengan PSU	0.59	0.59	100	0.59	0.59	100.00%	0,18	0,18	0
4	Meningkatnya fasilitasi penyelesaian konflik pertanahan	Persentase penyelesaian izin lokasi	100	100	100	100%	100%	100.00%	0	0	0
		Persentase konflik pertanahan difasilitasi	100	100	100	100%	100%	100.00%	0	0	0
		Jumlah fasilitasi ganti rugi tanah	9	9	100	2 Angka	2 Angka	100.00%	2	2	0
5	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Level Maturitas SPIP Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan				2,35	3,132	133.28%			
		Nilai SAKIP Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan				B	BB	100.00%			
		Penurunan Temuan BPK dan/atau Inspektort				75%	75%	100.00%			
Capaian Rata-rata Kinerja					87,50			102,77%			-12,5

Sumber: Data olahan Subbag Keuangan, Program dan Asset

Dari tabel tersebut di atas terlihat bahwa Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan mengalami penurunan capaian kinerja hanya pada indikator kinerja Persentase pengembang yang tersertifikasi. Hal ini dikarenakan pada tahun anggaran 2023 Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan tidak dapat melaksanakan Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman hal ini dikarenakan Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan masih tetap fokus untuk permasalahan data dan validasi rumah korban bencana yang terjadi pada tanggal 25 Februari 2022.

Pada tabel berikut dapat dilihat perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Anggaran 2023 dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan.

Tabel 14.
Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun 2023
dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Renstra

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023	Target Renstra	% Capaian	Tingkat Kemajuan
1	Meningkatnya Cakupan Layanan Program Pengembangan Perumahan Guna Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Bidang Perumahan	Rasio penduduk korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100	100	100%	
		Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	100	100	100%	
2	Berkurangnya Rumah Tidak Layak Huni dan Berkurangnya Luas Kawasan Kumuh	Persentase areal kawasan kumuh	3.39%	3.68%	92%	
		Cakupan ketersediaan rumah layak huni	88,39	90.04	98%	
3	Tersedianya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk menunjang fungsi hunian	Persentase pengembang yang tersertifikasi	60%	60%	100%	
		Cakupan lingkungan sehat dan aman yang didukung dengan PSU	0.59	0.59	100%	
4	Meningkatnya fasilitasi penyelesaian konflik pertanahan	Persentase penyelesaian izin lokasi	100%	100%	100%	
		Persentase konflik pertanahan difasilitasi	100%	100%	100%	
		Jumlah fasilitasi ganti rugi tanah	2 Angka	9 Angka	22%	
5	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Level Maturitas SPIP Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	3	3	100%	
		Nilai SAKIP Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	BB	B	125%	
		Penurunan Temuan BPK dan/atau Inspektort	75%	75%	100%	

Dari beberapa indikator kinerja ada beberapa indikator kinerja yang tidak mencapai target sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis yaitu Persentase areal kawasan kumuh, Cakupan ketersediaan rumah layak huni, Jumlah fasilitasi ganti rugi tanah. Untuk mencapai target yang ditetapkan masih perlu banyak perbaikan dan inovasi.

Pada tahun 2023 Anggaran Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan sebesar **Rp. 12.138.481.757,-** yang dapat terealisasi adalah sebesar **Rp. 7.579.459.338,-** dengan sisa anggaran sebesar **Rp. 4.559.022.419,-**, dan perkejaan yang tidak dilaksanakan dan sudah dianggarkan kembali pada tahun 2023 sebesar **Rp. 3.655.260.503,-**. Nilai efisiensi yang didapat adalah sebesar **7,44%** dengan nilai sebesar **Rp. 903.761.916,-** Lebih jelasnya terlihat pada table berikut :

Tabel 15.
Analisis Atas Efisiensi
Pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Pada Tahun 2023

No	Sasaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Nilai Yang Tidak Terlaksana	Nilai Realisasi Ditambah yg Tidak Terlaksana	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya Cakupan Layanan Program Pengembangan Perumahan Guna Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Bidang Perumahan	686.767.000	308.339.475		308.339.475	55,10%
2	Berkurangnya Rumah Tidak Layak Huni dan Berkurangnya Luas Kawasan Kumuh	4.923.946.000	3.172.130.404	1.660.047.500	4.832.177.904	1,86%
	Tersedianya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk menunjang fungsi hunian	2.596.224.627	573.411.200	1.995.213.003	2.568.624.203	1,06%
3	Meningkatnya fasilitasi penyelesaian konflik pertanahan	195.394.000	135.714.050		135.714.050	30,549
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	3.736.150.130	3.389.864.209		3.389.864.209	9,26%
T o t a l		12.138.481.757	7.579.459.338	3.655.260.503	11.234.719.841	7,44%

Sumber: Data olahan Subbag Keuangan, Program dan Asset

Penjelasan dan analisa pencapaian kinerja pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan pada masing-masing sasaran strategis adalah sebagai berikut :

3.1.1 Sasaran Strategis 1 : Meningkatkan Cakupan Layanan Program Pengembangan Perumahan Guna Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Bidang Perumahan

Sasaran strategis ini merupakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang wajib dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 dan Permendagri Nomor 100 Tahun

2018 tentang Jenis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Perumahan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, terdiri atas :

- a. Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota; dan
- b. Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

A. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 1 Tahun 2023

Capaian keberhasilan dari tujuan dan Sasaran Strategis 1 adalah dengan membandingkan antara target dan realisasi masing-masing indikator kinerja, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 16.
Perbandingan Target dan Realisasi Sasaran Strategis 1 Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Capaian Tahun 2023
1	Meningkatnya Cakupan Layanan Program Pengembangan Perumahan Guna Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Bidang Perumahan	Rasio penduduk korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100	100	100.00%
		Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	100	100	100.00%

Sumber: Data olahan Subbag Keuangan, Program dan Asset

Capaian Sasaran Strategis 1 pada Tahun 2023, pada indikator kinerja Rasio Penduduk Korban Bencana yang memperoleh rumah layak huni ditetapkan capaiannya adalah 100%. Pada penetapan capaian ini diasumsikan bahwa target yang diselesaikan sama banyak dengan realisasi dilapangan. Pada Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota, capaiannya ditetapkan 100% dikarenakan tidak ada dilakukan relokasi.

B. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 Tahun 2023 dengan tahun 2022

Perbandingan antara target, realisasi dan capaian Sasaran Strategis 1 tahun 2023 dengan tahun sebelumnya bertujuan untuk melihat kemajuan dan kemunduran kinerja guna mengetahui kecendrungan kinerja apakah meningkat atau menurun dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 17.
Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja
Sasaran Strategis 1 Tahun 2023 dengan tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2022			Tahun 2023			Perbandingan		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya Cakupan Layanan Program Pengembangan Perumahan Guna Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Bidang Perumahan	Rasio penduduk korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100	100	100	100	100	100	100	100	100
		Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber: Data olahan Subbag Keuangan, Program dan Asset

Kinerja Sasaran Strategis 1 pada tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2022, pada kedua tahun ini capaian kinerja adalah sama sama 100%.

C. Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 1 sampai dengan Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra

Pada tabel berikut dapat dilihat perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 1 Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan.

Tabel 18.
Perbandingan Realisasi Sasaran Strategis 1 sampai dengan Tahun 2023
dengan Target jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Renstra

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023	Target Renstra	% Capaian	Tingkat Kemajuan
1	Meningkatnya Cakupan Layanan Program Pengembangan Perumahan Guna Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Bidang Perumahan	Rasio penduduk korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100	100	100	
		Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	100	100	100	

Sumber: Data olahan Subbag Keuangan, Program dan Asset

Pada Tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian sasarannya adalah 100% terhadap target yang telah ditetapkan dalam Renstra.

D. Analisis penyebab peningkatan/penurunan Kinerja serta alternative solusi yang dilakukan

Sehubungan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) ini, pada tanggal 25 Februari 2021 terjadi bencana gempa bumi yang mengakibatkan kerusakan rumah masyarakat Rusak Berat 1.111 unit rumah, Rusak Sedang 1.171 unit rumah, Rusak Ringan 2.172 unit rumah.

Pada anggaran tahun 2023 sudah disediakan anggaran sebesar Rp. 27.061.254.400,- ditargetkan untuk menyelesaikan rumah Rusak Sedang dan Rusak Ringan, namun pelaksanaan rehabilitasi rumah Rusak Sedang dan Rusak Ringan belum dapat dilaksanakan karena status bencana daerah masih Darurat Menuju Pemulihan. Maka pada anggaran perubahan nilai anggaran dirubah menjadi Rp. 686.767.000,-. Sisa anggaran tersebut dijadikan SILPA dan dimasukan pada Anggaran tahun 2024.

Sementara untuk rumah Rusak Berat dilaksanakan oleh BPBD Kabupaten Pasaman Barat dengan Dana Siap Pakai (DSP) dapat menyelesaikan Pembangunan Rumah Korban Bencana sebanyak 725 Unit rumah.

E. Analisis atas Efisiensi Sumber Daya

Tingkat efisiensi Sasaran Strategis 1 ini adalah sebesar Rp. 378.427.525,- (55,10%)

Tabel 19.
Tingkat Efisiensi Sasaran Strategis 1

No	Sasaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Nilai Yang Tidak Terlaksana	Nilai Realisasi Ditambah yg Tidak Terlaksana	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya Cakupan Layanan Program Pengembangan Perumahan Guna Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Bidang Perumahan	686.767.000	308.339.475		308.339.475	55,10%

Sumber: Data olahan Subbag Keuangan, Program dan Asset

F. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja Sasaran Strategis 1

Untuk mendukung pencapaian indikator kinerja sasaran strategis Meningkatkan Cakupan Layanan Program Pengembangan Perumahan Guna Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Bidang Perumahan, sudah disediakan anggarannya pada program pengembangan perumahan, yang terdiri dari 3 (tiga) kegiatan dan 5 (lima) sub kegiatan, dengan perincian sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Perumahan

- Kegiatan : Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan : Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani
- a. Anggaran : Rp. 23.580.000,-
- b. Realisasi : Rp. 0,- (0%)
- c. Permasalahan : -.
- d. Solusi : Sudah dianggarkan kembali pada tahun 2024

2. Program Pengembangan Perumahan

- Kegiatan : Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan : Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota
- a. Anggaran : Rp. 440.350.000,-
- b. Realisasi : Rp. 178.527.500,- (40,54%)
- c. Permasalahan : Proses verifikasi di lapangan sangat sulit dilakukan, karena banyaknya data yang bermasalah.
- d. Solusi : Diperlukan verifikasi yang sangat valid agar hasil datanya nanti tidak menjadi polemic ditengah masyarakat terdampak bencana

3. Program Pengembangan Perumahan

- Kegiatan : Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan : Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/ Sukarelawan Tanggap Bencana
- a. Anggaran : Rp. 26.255.000,-
- b. Realisasi : Rp. 730.500,- (2,78%)
- c. Permasalahan : Sub Kegiatan ini tidak dilaksanakan, hanya saja terjadi realisasi anggaran dikarenakan terpakai biaya untuk Perjalanan Dinas.
- d. Solusi : -.

4. Program Pengembangan Perumahan

- Kegiatan : Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan : Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator
- a. Anggaran : Rp. 46.204.500,-
- b. Realisasi : Rp. 24.200.000,- (52,38%)
- c. Permasalahan : Terjadinya defisit keuangan daerah

d. Solusi : Perlunya ditingkatkan tingkat efisiensi penggunaan anggaran.

5. Program Pengembangan Perumahan

Kegiatan : Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan : Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana

a. Anggaran : Rp. 150.377.500,-

b. Realisasi : Rp. 104.881.475,- (69,75%)

c. Permasalahan : Lamanya proses eksekusi pembangunan kembali Rumah dengan tingkat kerusakan Rusak Berat sehingga status bencana belum dialihkan dari darurat menuju pemulihan ke Rehabilitasi dan Rekonstruksi sehingga dana rehabilitasi rumah korban bencana belum bisa direalisasikan.

d. Solusi : Sudah dianggarkan kembali pada tahun 2024

3.1.2 Sasaran Strategis 2 : Berkurangnya Rumah Tidak Layak Huni dan Berkurangnya Luas Kawasan Kumuh

Dari sebanyak 87.524 unit rumah di Kabupaten Pasaman Barat, sebanyak 10.543 unit rumah adalah merupakan Rumah Tidak Layak Huni, atau Cakupan ketersediaan rumah layak huni 88,39%

Sementara untuk indikator kinerja Berkurangnya Luas Kawasan Kumuh, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor 188.45/729/BUP-PASBAR/2021 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kabupaten Pasaman Barat. Kawasan kumuh yang menjadi kewenangan Kabupaten Pasaman Barat adalah Luas Kawasan Permukiman kumuh dibawah 10 ha dengan luas 150,46 Ha. Luas kawasan kumuh yang telah dilakukan pemugaran kawasan kumuh seluas 10,46 Ha. saat ini adalah 140,00 Ha sudah terlaksana pengurangan luas kawasan kumuh sebesar 3,39%.

A. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 2 Tahun 2023

Capaian keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis 2 adalah dengan membandingkan antara target dan realisasi masing-masing indikator kinerja, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 20.
Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 2
Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Capaian Tahun 2023
1	Berkurangnya Rumah Tidak Layak Huni dan Berkurangnya Luas Kawasan Kumuh	Persentase areal kawasan kumuh	3.39%	3.39%	100.00%
		Cakupan ketersediaan rumah layak huni	88,39	88,39	100.00%

Sumber: Data Bidang Kawasan Pemukiman dan Bidang Perumahan

Pada table diatas terlihat bahwa dari dua indikator kinerja yang mendukung pencapaian sasaran strategis Berkurangnya Rumah Tidak Layak Huni dan Berkurangnya Luas Kawasan Kumuh capaiannya adalah 100%.

B. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2 Tahun 2023 dengan tahun 2022

Perbandingan antara target, realisasi dan capaian Sasaran Strategis 2 tahun 2023 dengan tahun sebelumnya bertujuan untuk melihat kemajuan dan kemunduran kinerja guna mengetahui kecendrungan kinerja apakah meningkat atau menurun.

Tabel 21.
Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2 Tahun 2023 dengan tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2022			Tahun 2023			Perbandingan		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	Berkurangnya Rumah Tidak Layak Huni dan Berkurangnya Luas Kawasan Kumuh	Persentase areal kawasan kumuh	3.68 %	3.68 %	100	3.39%	3.39%	100.00%	-0,56	-0,56	0
		Cakupan ketersediaan rumah layak huni	87,79	87,79	100	88,39	88,39	100.00%	2,25	2,25	0

Sumber: Data Bidang Kawasan Pemukiman dan Bidang Perumahan

C. Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 2 sampai dengan Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra

Pada tabel berikut dapat dilihat perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 2 Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan.

Tabel 22.
Perbandingan Realisasi Sasaran Strategis 2 sampai dengan Tahun 2023
dengan Target jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Renstra

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2022	Target Renstra	% Capaian	Tingkat Kemajuan
i	Berkurangnya Rumah Tidak Layak Huni dan Berkurangnya Luas Kawasan Kumuh	Persentase areal kawasan kumuh	3.39%	3.68%	92%	
		Cakupan ketersediaan rumah layak huni	88,39	90.04	98%	

Sumber: Data Bidang Kawasan Pemukiman dan Bidang Perumahan

D. Analisis penyebab peningkatan/penurunan Kinerja Sasaran Strategis 2 serta alternative solusi yang dilakukan

Tercapainya target kinerja untuk sasaran ini didukung oleh tingginya komitmen dari Pemerintah Kabupaten dan Juga Anggota DPRD dalam penyediaan Rumah Layak Huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (kurang mampu).

Dalam upaya pengentasan kawasan kumuh, ketersediaan anggaran yang tidak sesuai dengan RPJMD dan Renstra OPD, yang menyebabkan pelaksanaan pekerjaan tidak bisa difokuskan untuk menuntaskan satu lokasi kawasan kumuh. Kedepannya perlu ditetapkan lokasi kawasan kumuh yang akan dituntaskan pada tahun anggaran tersebut.

Sementara untuk indikator kinerja Persentase areal kawasan kumuh ada beberapa paket yang ditambahkan pada saat anggaran perubahan yang tidak dapat dilaksanakan, hal ini diakibatkan oleh terlambatnya pengesahan anggaran tahun 2023.

Paket yang ditambahkan pada saat anggaran perubahan tersebut adalah merupakan perpindahan paket dari nagari yang juga bukan merupakan kewenangan OPD, sehingga tidak mempengaruhi capaian kinerja.

E. Analisis atas Efisiensi Sumber Daya Sasaran Strategis 2

Tingkat efisiensi Sasaran Strategis 2 ini adalah sebesar Rp. 91,585.395,- (1,86%)

Tabel 23.
Tingkat Efisiensi Sasaran Strategis 2

No	Sasaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Nilai Yang Tidak Terlaksana	Nilai Realisasi Ditambah yg Tidak Terlaksana	Tingkat Efisiensi
2	Berkurangnya Rumah Tidak Layak Huni dan Berkurangnya Luas Kawasan Kumuh	4.923.946.000	3.172.130.404	1.660.047.500	4.832.177.904	1,86%

Sumber: Data Bidang Kawasan Pemukiman dan Bidang Perumahan

F. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja Sasaran Strategis 2

Dalam upaya pencapaian sasaran Berkurangnya Rumah Tidak Layak Huni dan Berkurangnya Luas Kawasan Kumuh, sudah disediakan anggarannya pada program Kawasan Pemukiman, pada kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Pemukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha, dengan perincian sebagai berikut :

1. Program Kawasan Pemukiman

- Kegiatan : Peningkatan Kualitas Kawasan Pemukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
- Sub Kegiatan : Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh
- a. Anggaran : Rp. 2.879.423.000,-
- b. Realisasi : Rp. 1.181.552.500,- (57,63%)
- c. Pekerjaan : Pekerjaan fisik yang selesai 100%, pekerjaan yang dilaksanakan adalah :
- Pembangunan Drainase di Depan Mesjid Duren Sari Jorong Sidomulyo Kecamatan Ranah Batahan
 - Pembangunan Drainase Perumahan Basung Indah Kecamatan Kinali
 - Peningkatan Jalan Batang Haluan Nagari Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman
 - Peningkatan Jalan di Katimaha Nagari Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman
 - Peningkatan Jalan Gugung Sorik Jorong Koto Sawah Kecamatan Lembah Melintang
 - Peningkatan Jalan Lingkar Kampung Tengah Jorong Padang Tujuh Kecamatan Pasaman

Paket Paket Fisik yang ditambahkan pada saat anggaran perubahan tahun 2023 :

- Pembangunan Jalan Lingkung Mesjid Jabal Rahmah Binjai Jorong Koto Dalam
- Pembangunan Jalan Lingkung Permukiman RT 02 Sukorejo Pujorahayu
- Peningkatan Jalan Depan Mesjid Raya Simpang Empat Jorong Katimaha
- Peningkatan Jalan Jorong Koto Dalam (Beton K175)
- Rabat Beton Gang Mukijan Jorong Mahakarya Kampung 2
- Rabat Beton Jorong Kasiak Putih
- Pembangunan Jalan SMA N 1 Sungai Aur Jorong Air Haji
- Pengerasan Jalan Kebun Jorong Batang Lingkin
- Peningkatan Jalan Gang Rahmad ke Samping SMA Al Istiqomah
- Peningkatan jalan pada Kawasan Perumahan Pasar Batang Lingkin (Beton K175)
- Peningkatan Jalan pada Kawasan Perumahan RT 03-04 Kampung V Mahakarya
- Rabat Beton Gang Mulia Jorong Ophir
- Dam/Drainase Jorong Parit
- Dam/Drainase Jorong Tanah Datar
- Pembangunan gorong-gorong SD 11 Pujorahayu

d. Permasalahan :

- Tidak adanya anggaran yang dikhususkan untuk menyelesaikan satu wilayah kawasan kumuh yang menyebabkan kesulitan menghitung tingkat berkurangnya kawasan kumuh.
- Terlambatnya pengesahan anggaran perubahan TA. 2023 yang mengakibatkan beberapa pekerjaan tidak dapat dilaksanakan karena waktu yang tersisa tidak cukup untuk pelaksanaan pekerjaan.
- Belum adanya DED masing-masing kawasan kumuh.
- Adanya dimasukan paket-paket pekerjaan yang tidak sesuai dengan tupoksi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

e. Solusi :

- Perlu dibuatkan DED kawasan kumuh
- Kedepannya sangat dibutuhkan usaha memperjuangkan agar anggaran untuk mengentaskan kawasan kumuh ini
- Agar semua pihak yang mempunyai kewenangan mampu mempertahankan eksistensi tanpa intervensi.

4. Program Perumahan Dan Kawasan Pemukiman Kumuh

Kegiatan : Pencegahan Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota

- Sub Kegiatan : Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
- a. Anggaran : Rp. 2.044.523.000,-
- b. Realisasi : Rp. 1.992.763.750,- (97,47%)
- c. Pekerjaan :
- Bantuan Stimulan Penyediaan Rumah Swadaya Prasejahtera Individu Wilayah I sebanyak 24 Unit Rumah.
 - Bantuan Stimulan Penyediaan Rumah Swadaya Prasejahtera Individu Wilayah II sebanyak 14 Unit Rumah.
 - Bantuan Stimulan Penyediaan Rumah Swadaya Prasejahtera Individu Wilayah III sebanyak 37 Unit Rumah.
 - Bantuan Stimulan Penyediaan Rumah Swadaya Prasejahtera Individu Wilayah IV sebanyak 10 Unit Rumah.
 - Bantuan Stimulan Penyediaan Rumah Swadaya Prasejahtera Individu yang dilakukan oleh Kementrian PUPR sebanyak 425 Unit Rumah
 - Bantuan Rehabilitasi rumah yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat sebanyak 85 Unit Rumah.
- d. Permasalahan : Kurangnya validnya data masyarakat miskin yang rumahnya tidak layak huni, sehingga bantuan terkadang salah sasaran.
- e. Solusi : Perlunya disusun data base perumahan

3.1.3 Sasaran Strategis 3 : Tersedianya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk menunjang fungsi hunian

Di Kabupaten Pasaman Barat saat ini ada 39 Pengembang Perumahan, dari semua pengembang tersebut sudah banyak yang tidak aktif lagi mengurus perumahan yang mereka kembangkan, yang mengakibatkan fungsi koordinasi oleh OPD sulit dilakukan. Sampai saat ini pengembang perumahan yang ada di Pasaman Barat hanya sekedar di data dan di registrasi saja sementara untuk sertifikasi pengembang perumahan belum dapat dilaksanakan.

A. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 3 Tahun 2023

Capaian keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis 3 adalah dengan membandingkan antara target dan realisasi masing-masing indikator kinerja, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 24.
Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 3
Tersedianya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk menunjang
fungsi hunian Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Capaian Tahun 2023
1	Tersedianya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk menunjang fungsi hunian	Persentase pengembang yang tersertifikasi	60%	60%	100.00%
		Cakupan lingkungan sehat dan aman yang didukung dengan PSU	0.78	0,63	80,77%

Sumber: Data Bidang Kawasan Pemukiman

B. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3 Tahun 2023 dengan tahun 2022

Perbandingan antara target, realisasi dan capaian Sasaran Strategis 3 tahun 2023 dengan tahun sebelumnya bertujuan untuk melihat kemajuan dan kemunduran kinerja guna mengetahui kecenderungan kinerja apakah meningkat atau menurun.

Tabel 25.
Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3
Tahun 2023 dengan tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2022			Tahun 2023			Perbandingan		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	Tersedianya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk menunjang fungsi hunian	Persentase pengembang yang tersertifikasi	60%	0	0.00	60%	60%	100.00%	0,1	-0,5	-100
		Cakupan lingkungan sehat dan aman yang didukung dengan PSU	0.59	0.59	100	0.59	0.59	100.00%	0,18	0,18	0

Sumber: Data Bidang Kawasan Pemukiman

C. Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 3 sampai dengan Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra

Pada tabel berikut dapat dilihat perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 3 Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan.

Tabel 26.
Perbandingan Realisasi Sasaran Strategis 3 sampai dengan Tahun 2023
dengan Target jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Renstra

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2022	Target Renstra	% Capaian	Tingkat Kemajuan
1	Tersedianya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk menunjang fungsi hunian	Persentase pengembang yang tersertifikasi	60%	60%	100%	
		Cakupan lingkungan sehat dan aman yang didukung dengan PSU	0.59	0.59	100%	

Sumber: Data Bidang Kawasan Pemukiman dan Bidang Perumahan

D. Analisis penyebab peningkatan/penurunan Kinerja Sasaran Strategis 3 serta alternative solusi yang dilakukan

Pada tahun 2023, registrasi pengembang dan sertifikasi pengembang perumahan tidak dapat dilaksanakan karena kegiatan difokuskan untuk mendata dan memverifikasi korban gempa, selain itu juga anggaran yang tersedia juga sangat kecil. Diharapkan pada tahun depan dapat dikejar target yang tertinggal.

Sementara untuk indikator kinerja Cakupan lingkungan sehat dan aman yang didukung dengan PSU ada beberapa paket yang ditambahkan pada saat anggaran perubahan yang tidak dilaksanakan hal ini diakibatkan oleh terlambatnya pengesahan anggaran tahun 2023.

Paket yang ditambahkan pada saat anggaran perubahan tersebut adalah merupakan perpindahan paket dari nagari yang juga bukan merupakan kewenangan OPD, sehingga tidak mempengaruhi capaian kinerja.

E. Analisis atas Efisiensi Sumber Daya Sasaran Strategis 3

Tingkat efisiensi Sasaran Strategis 3 ini adalah sebesar Rp. 27600424,- (1,06%)

Tabel 27.
Tingkat Efisiensi Sasaran Strategis 3

No	Sasaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Nilai Yang Tidak Terlaksana	Nilai Realisasi Ditambah yg Tidak Terlaksana	Tingkat Efisiensi
1	Tersedianya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk menunjang fungsi hunian	2.596.224.627	573.411.200	1.995.213.003	2.568.624.203	1,06%

F. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja Sasaran Strategis 3

Sasaran Tersedianya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk menunjang fungsi hunian, dilaksanakan pada 2 (dua) program yaitu program Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) dan program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman, dengan perincian sebagai berikut :

1. Program Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)

- Kegiatan : Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan
- Sub Kegiatan : Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
- a. Anggaran : Rp. 2.571.174.627,-
- b. Realisasi : Rp. 559.123.750,- (52,65%)
- c. Pekerjaan : Pekerjaan fisik selesai 100%, paket pekerjaannya adalah :

- Peningkatan Jalan Perumahan Alcindi Jalur 32 Jorong Kampung Cubadak Kecamatan Pasaman
- Peningkatan Jalan Perumahan Baskem Kecamatan Kinali
- Peningkatan Jalan Perumahan Durian Kilangan Kecamatan Kinali
- Pengadaan Lampu Tenaga Surya untuk Diserahkan kepada Masyarakat di Kabupaten Pasaman Barat

Pekerjaan fisik yang tidak dilaksanakan paket pekerjaannya adalah :

- Jalan Lingkuang Perumahan Durian Tiga Batang Nagari Koto Baru Kec. LND
- Pembangunan jalan lingkar di jorong Parit
- Peningkatan Jalan Lingkuang Padang Kadok Nagari Bandua Balai Kec. Kinali
- Peningkatan Jalan pada Kawasan Perumahan Jalan Gang Blok B Jalur 4 ke 3 Jorong Jambak Selatan
- Peningkatan Jalan pada Kawasan Perumahan Jorong Sungai Talang
- Peningkatan Jalan pada Kawasan Perumahan Juranggo Tongar
- Peningkatan Jalan pada Kawasan Perumahan Lingkungan Kampung Dalam Katimaha
- Peningkatan Jalan pada Kawasan Perumahan Rabat Beton Gang Suryo Kencono Jorong Nagari Persiapan Ophir
- Peningkatan Jalan pada Kawasan Perumahan Rabat Beton yang sudah dibangun nagari Sungai Aua Jorong Sungai Tanang
- Rabat Beton huta Bargot jorong kasik putih

- Jalan Lingkungan Pemukiman Dusun I Padang Lawas
- Lanjutan Jalan Lingkung Dusun III Pujorahayu
- Lanjutan jalan lingkung perumahan Blok F nagari Ophir
- Peningkatan jalan gang mangga 2 jalur 8 dusun bayur
- Peningkatan Jalan Kampung 5 Mahakarya
- Peningkatan Jalan Lingkar Rabat beton jorong kampung tangan padang tujuh
- Peningkatan Jalan Lingkung Menuju Mesjid Nurul Huda Pertanian Pd 7
- Rabat Beton Jalan Lingkungan Samping SMA Al Istiqamah Simpang Empat
- Rabat Beton Kampung Kopi, Kecamatan Koto Balingka

d. Permasalahan :

- Pengembang perumahan masih belum menyerahkan asetnya ke Pemerintah Daerah, sehingga Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan tidak bisa melakukan Paket Pekerjaan pendukung PSU di Lokasi Perumahan yang dibangun Pengembang Perumahan tersebut.
- Pengembang perumahan sudah tidak lagi mengelola perumahan yang dibangunnya

e. Solusi :

- Kedepannya perlunya dilakukan sosialisasi agar pengembang perumahan segera melakukan penyerahan asset PSUnya kepada Pemerintah Daerah dan dicatat didalam KK asset.

2. Program peningkatan pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bidang Perumahan dan kawasan permukiman

Kegiatan : Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil

Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil

a. Anggaran : Rp. 25.050.000,-

b. Realisasi : Rp. 14.287.450,- (57,04%)

c. Pekerjaan :

d. Permasalahan :

e. Solusi :

3.1.4 Sasaran Strategis 4 : Meningkatkan fasilitasi penyelesaian konflik pertanahan

Meningkatnya fasilitasi penyelesaian konflik pertanahan adalah suatu perkembangan positif dalam upaya mengatasi masalah pertanahan yang seringkali menjadi sumber konflik di berbagai daerah. Fasilitasi penyelesaian konflik pertanahan adalah proses

mediasi atau pendekatan yang digunakan untuk membantu pihak-pihak yang terlibat dalam konflik pertanahan untuk mencapai kesepakatan atau solusi yang memadai tanpa harus melalui proses hukum yang panjang dan mahal.

A. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 4 Tahun 2023

Capaian keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis 4 adalah dengan membandingkan antara target dan realisasi masing-masing indikator kinerja, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 28.
Meningkatnya fasilitasi penyelesaian konflik pertanahan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Capaian Tahun 2023
1	Meningkatnya fasilitasi penyelesaian konflik pertanahan	Persentase penyelesaian izin lokasi	100%	100%	100.00%
		Persentase konflik pertanahan difasilitasi	100%	100%	100.00%
		Jumlah fasilitasi ganti rugi tanah	2 Angka	2 Angka	100.00%

Sumber: Data Bidang Pertanahan

B. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Sasaran Strategis 4 Tahun 2023 dengan tahun 2022

Perbandingan antara target, realisasi dan capaian Sasaran Strategis 4 tahun 2023 dengan tahun sebelumnya bertujuan untuk melihat kemajuan dan kemunduran kinerja guna mengetahui kecenderungan kinerja apakah meningkat atau menurun.

Tabel 29.
Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Sasaran Strategis 4 Tahun 2023 dengan tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2022			Tahun 2022			Perbandingan		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya fasilitasi penyelesaian konflik pertanahan	Persentase penyelesaian izin lokasi	100	100	100	100%	100%	100.00 %	0	0	0

	Persentase konflik pertanahan difasilitasi	100	100	100	100%	100%	100.00 %	0	0	0
	Jumlah fasilitasi ganti rugi tanah	9	9	100	2 Angka	2 Angka	100.00 %	2	2	0

Sumber: Data Bidang Pertanahan

C. Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 4 sampai dengan Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra

Pada tabel berikut dapat dilihat perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 4 Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan.

Tabel 30.
Perbandingan Realisasi Sasaran Strategis 4 sampai dengan Tahun 2023 dengan Target jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Renstra

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023	Target Renstra	% Capaian	Tingkat Kemajuan
1	Meningkatnya fasilitasi penyelesaian konflik pertanahan	Persentase penyelesaian izin lokasi	100%	100%	100%	
		Persentase konflik pertanahan difasilitasi	100%	100%	100%	
		Jumlah fasilitasi ganti rugi tanah	2 Angka	9 Angka	22%	

Sumber: Data Bidang Pertanahan

D. Analisis penyebab peningkatan/penurunan Kinerja Sasaran Strategis 4 serta alternative solusi yang dilakukan

Sasaran strategis meningkatnya fasilitasi penyelesaian konflik pertanahan, hamper semua kegiatan yang ada hanyalah fungsi fasilitasi dan fungsi koordinasi. Tingkat keberhasilannya dilaksanakan oleh OPD lain. Kedepannya diharapkan bidang pertanahan meningkatkan intensitas koordinasinya dengan OPD terkait.

E. Analisis atas Efisiensi Sumber Daya Sasaran Strategis 4

Tingkat efisiensi Sasaran Strategis 4 ini adalah sebesar Rp. 59.679.950,- (30,54%)

Tabel 31.
Tingkat Efisiensi Sasaran Strategis 4

No	Sasaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi
3	Meningkatnya fasilitasi penyelesaian konflik pertanahan	195.394.000	135.714.050	30,54%

F. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja Sasaran Strategis 4

Sasaran Meningkatkan fasilitasi penyelesaian konflik pertanahan, dilaksanakan pada 3 (tiga) program yaitu Program Pemberian Izin Lokasi, Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dan Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan, dengan perincian sebagai berikut :

1. Program Pemberian Izin Lokasi

Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota:

- a. Anggaran : Rp. 27.321.000,-
- b. Realisasi : Rp. 18.132.600,- (66,37%)
- c. Permasalahan dan Solusi :

Bidang Pertanahan kurang dilibatkan oleh OPD pelaksana pekerjaan, Bidang Pertanahan diharapkan meningkatkan koordinasi dengan OPD pelaksana pekerjaan.

2. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan

Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

- a. Anggaran : Rp. 118.437.500,-
- b. Realisasi : Rp. 91.404.100,- (77,92%)
- c. Permasalahan dan Solusi :

Bidang Pertanahan kurang dilibatkan oleh OPD pelaksana pekerjaan, Bidang Pertanahan diharapkan meningkatkan koordinasi dengan OPD pelaksana pekerjaan.

3. Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan

Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

a. Anggaran : Rp. 49.635.500,-

b. Realisasi : Rp. 26.177.350,- (74,15%)

c. Permasalahan dan Solusi :

Bidang Pertanahan kurang dilibatkan oleh OPD pelaksana pekerjaan, Bidang Pertanahan diharapkan meningkatkan koordinasi dengan OPD pelaksana pekerjaan.

3.1.5 Sasaran Strategis 5 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Didalam upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman adalah dengan memenuhi semua unsur penunjang, agar semua sasaran yang ingin dicapai dapat terwujud

A. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 5 Tahun 2023

Capaian keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis 5 adalah dengan membandingkan antara target dan realisasi masing-masing indikator kinerja, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 32.
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Capaian Tahun 2023
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Level Maturitas SPIP Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	2,35	3,132	133.28%
		Nilai SAKIP Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	B	BB	100.00%
		Penurunan Temuan BPK dan/atau Inspektort	75%	75%	100.00%

Sumber: Sekretariat DPKPP

B. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Sasaran Strategis 5 Tahun 2023 dengan tahun 2022

Perbandingan antara target, realisasi dan capaian Sasaran Strategis 5 tahun 2023 dengan tahun sebelumnya bertujuan untuk melihat kemajuan dan kemunduran kinerja guna mengetahui kecendrungan kinerja apakah meningkat atau menurun.

Tabel 33.
Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Sasaran Strategis 4 Tahun 2023 dengan tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2022			Tahun 2022			Perbandingan		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Level Maturitas SPIP Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	2,35	3,132	133.28 %	2,35	3,132	133.28 %	0	0	0
		Nilai SAKIP Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	B	BB	100.00 %	B	BB	100.00 %	0	0	0
		Penurunan Temuan BPK dan/atau Inspektort	75%	75%	100.00 %	75%	75%	100.00 %	0	0	0

Sumber: Sekretariat DPKPP

C. Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 5 sampai dengan Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra

Pada tabel berikut dapat dilihat perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 5 Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan.

Tabel 34.
Perbandingan Realisasi Sasaran Strategis 5 sampai dengan Tahun 2023
dengan Target jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Renstra

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023	Target Renstra	% Capaian	Tingkat Kemajuan
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Level Maturitas SPIP Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	3	3	100%	
		Nilai SAKIP Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	BB	B	125%	
		Penurunan Temuan BPK dan/atau Inspektort	75%	75%	100%	

Sumber: Sekretariat DPKPP

D. Analisis penyebab peningkatan/penurunan Kinerja Sasaran Strategis 5 serta alternative solusi yang dilakukan

Sasaran strategis Meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, adalah merupakan sasaran yang tujuannya untuk pemenuhan semua kebutuhan OPD dalam upaya mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, dalam hal tersebut telah disediakan semua fasilitas penunjang yang akan digunakan dalam rangka pencapaian sasaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanaha Kabupaten Pasaman Barat.

E. Analisis atas Efisiensi Sumber Daya Sasaran Strategis 5

Tingkat efisiensi Sasaran Strategis 4 ini adalah sebesar Rp. 346.285.921,- (9,26%)

Tabel 35.
Tingkat Efisiensi Sasaran Strategis 5

No	Sasaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	3.736.150.130	3.389.864.209	9,26%

F. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja Sasaran Strategis 5

Sasaran Meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, dilaksanakan pada 1 (satu) program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan perincian sebagai berikut :

1. Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - a. Anggaran : Rp. 2.703.497.140,-
 - b. Realisasi : Rp. 2.528.433.862,- (93,52%)
 - c. Permasalahan dan Solusi :
2. Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - a. Anggaran : Rp. 272.214.500,-
 - b. Realisasi : Rp. 253.269.500,- (93,04%)
 - c. Permasalahan dan Solusi :
3. Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - a. Anggaran : Rp. 64.747.240,-
 - b. Realisasi : Rp. 53.250.740,- (82,24%)
 - c. Permasalahan dan Solusi :
4. Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
 - a. Anggaran : Rp. 67.719.000,-
 - b. Realisasi : Rp. 45.237.035,- (66,80%)
 - c. Permasalahan dan Solusi :
5. Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - a. Anggaran : Rp. 6000000,-
 - b. Realisasi : Rp. 5940000,- (99,00%)
 - c. Permasalahan dan Solusi :

6. Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
a. Anggaran : Rp. 51.230.000,-
b. Realisasi : Rp. 45.160.000,- (88,15%)
c. Permasalahan dan Solusi :
7. Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
a. Anggaran : Rp. 197.560.000,-
b. Realisasi : Rp. 147.219.100,- (74,52%)
c. Permasalahan dan Solusi :
8. Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
a. Anggaran : Rp. 142769750,-
b. Realisasi : Rp. 142769750,- (100%)
c. Permasalahan dan Solusi :
9. Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
a. Anggaran : Rp. 47.540.000,-
b. Realisasi : Rp. 28.077.815,- (59,06%)
c. Permasalahan dan Solusi :
10. Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
a. Anggaran : Rp. 46.980.000,-
b. Realisasi : Rp. 33.808.125,- (71,96%)
c. Permasalahan dan Solusi :

11. Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

- a. Anggaran : Rp. 87642500,-
- b. Realisasi : Rp. 78392782,- (89,45%)
- c. Permasalahan dan Solusi :

12. Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

- a. Anggaran : Rp. 48250000,-
- b. Realisasi : Rp. 28305500,- (58,66%)
- c. Permasalahan dan Solusi :

3.2 Realisasi Anggaran Tahun 2023

Pada tahun 2023 dalam upaya pencapaian target kinerja tersedia pagu anggaran Rp. 12.138.481.757,-, sementara realisasi keuangan yang dapat dicapai adalah sebesar Rp. 7.581.645.184,- atau 62,46,%. Untuk realisasi program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 36.
Realisasi Anggaran Pada Tahun 2023

No Rekening	Kegiatan/Sub Kegiatan	Total Pagu Anggaran (Rp)	Total Realisasi			Ket
			Fisik	Keuangan		
				%	Rp	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	11.943.087.757	79,49	7.445.931.134	59,39	-
1.04	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	11.943.087.757	79,49	7.445.931.134	118,83	-
1.04 . 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.736.150.130	85,93	3.389.864.209	95,18	-
1.04 . 01 . 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.975.711.640	76,13	2.781.703.362	93,48	-
1.04 . 01 . 2.02 . 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.703.497.140	81,49	2.528.433.862	93,52	
1.04 . 01 . 2.02 . 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	272.214.500	43,37	253.269.500	93,04	

No Rekening	Kegiatan/Sub Kegiatan	Total Pagu Anggaran (Rp)	Total Realisasi			Ket
			Fisik	Keuangan		
				%	Rp	
1.04 . 01 . 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	64.747.240	43,15	53.250.740	82,24	-
1.04 . 01 . 2.03 . 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	64.747.240	43,15	53.250.740	82,24	
1.04 . 01 . 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	67.719.000	19,35	45.237.035	66,80	-
1.04 . 01 . 2.05 . 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	67.719.000	19,35	45.237.035	66,80	
1.04 . 01 . 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	254.790.000	75,86	198.319.100	77,84	-
1.04 . 01 . 2.06 . 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.000.000	52,33	5.940.000	99,00	
1.04 . 01 . 2.06 . 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	51.230.000	87,12	45.160.000	88,15	
1.04 . 01 . 2.06 . 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	197.560.000	74,59	147.219.100	74,52	
1.04 . 01 . 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	142.769.750	100,00	142.769.750	100,00	-
1.04 . 01 . 2.07 . 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	142.769.750	100,00	142.769.750	100,00	
1.04 . 01 . 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	94.520.000	52,17	61.885.940	65,47	-
1.04 . 01 . 2.08 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	47.540.000	41,46	28.077.815	59,06	
1.04 . 01 . 2.08 . 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	46.980.000	64,08	33.808.125	71,96	
1.04 . 01 . 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	135.892.500	54,25	106.698.282	78,52	
1.04 . 01 . 2.09 . 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	87.642.500	67,71	78.392.782	89,45	
1.04 . 01 . 2.09 . 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	48.250.000	34,16	28.305.500	58,66	
1.04 . 02	Program Pengembangan Perumahan	686.767.000	44,90	308.339.475	44,90	-
1.04 . 02 . 2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	463.930.000	38,48	178.527.500	38,48	-
1.04 . 02 . 2.01 . 01	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	-	-	-	-	
1.04 . 02 . 2.01 . 03	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	23.580.000				
1.04 . 02 . 2.01 . 05	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	440.350.000	40,54	178.527.500	40,54	
1.04 . 02 . 2.02	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	72.459.500	3,27	24.930.500	55,16	-
1.04 . 02 . 2.02 . 01	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/ Sukarelawan Tanggap Bencana	26.255.000	3,27	730.500	2,78	
1.04 . 02 . 2.02 . 04	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	46.204.500	52,38	24.200.000	52,38	
1.04 . 02 . 2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	150.377.500	0,15	104.881.475	69,75	-
1.04 . 02 . 2.03 . 01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	150.377.500	0,15	104.881.475	69,75	

No Rekening	Kegiatan/Sub Kegiatan	Total Pagu Anggaran (Rp)	Total Realisasi			Ket
			Fisik	Keuangan		
				%	Rp	
1.04.02.2.04	Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-
1.04.02.2.04.01	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabuapten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	-	-	-	-	
1.04 . 03	Program Kawasan Permukiman	2.879.423.000	111,56	1.181.552.500	117,13	-
1.04 . 03 . 2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	2.879.423.000	111,56	1.181.552.500	117,13	-
1.04 . 03 . 2.03 . 06	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	2.879.423.000	57,63	1.181.552.500	57,63	
1.04 . 04	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	2.044.523.000	94,28	1.992.763.750	97,47	-
1.04 . 04 . 2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	2.044.523.000	94,28	1.992.763.750	97,47	-
1.04 . 04 . 2.01 . 01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	2.044.523.000	94,28	1.992.763.750	97,47	
1.04 . 05	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	2.571.174.627	52,65	559.123.750	52,65	-
1.04 . 05 . 2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	2.571.174.627	52,65	559.123.750	52,65	
1.04 . 05 . 2.01 . 02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	2.571.174.627	52,65	559.123.750	52,65	
1.04 . 06	Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	25.050.000		14.287.450		-
1.04.06.2.01	Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil	25.050.000		14.287.450	57,04%	
1.04.06.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	25.050.000		14.287.450		
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	195.394.000	65,03	135.714.050	69,46	-
2.10	PERTANAHAN	195.394.000	65,03	135.714.050	69,46	-
2.10 . 01	Program Pemberian Izin Lokasi	27.321.000	49,80	18.132.600	66,37	-
2.10 . 01 . 2.01	Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	27.321.000	66,37	18.132.600	66,37	
2.10 . 01 . 2.01 . 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha	27.321.000	66,37	18.132.600	66,37	

No Rekening	Kegiatan/Sub Kegiatan	Total Pagu Anggaran (Rp)	Total Realisasi			Ket
			Fisik	Keuangan		
				%	Rp	
2.10 . 04	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	118.437.500	77,92	91.404.100	77,17	-
2.10 . 04 . 2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	118.437.500	77,92	91.404.100	77,17	
2.10 . 04 . 2.01 . 02	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	118.437.500	77,92	91.404.100	77,17	
2.10 . 05	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	49.635.500	40,25	26.177.350	52,74	-
2.10 . 05 . 2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	49.635.500	40,25	26.177.350	52,74	-
2.10 . 05 . 2.01 . 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	49.635.500	40,25	26.177.350	52,74	
			-	-	-	
T O T A L		12.138.481.757	62,46	7.581.645.184	62,46	-

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi dalam tahun 2023, Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat telah merencanakan dan melaksanakan 19 (sembilan belas) kegiatan dalam 9 (sembilan) program
2. Hasil pencapaian atas indikator kinerja sasaran dalam beberapa klasifikasi pengukuran/ penilaian terlaksana dengan “ sangat baik” .
3. Hal tersebut berarti bahwa Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat dalam tahun 2023 telah berhasil mencapai sasaran strategis sebesar 100 % (dengan klasifikasi pengukuran penilaian : sangat baik)

4.2 Saran

Tingkat capaian kinerja menunjukkan outcome yang akan diciptakan oleh kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mencapai hasil maksimal perlu ditinjau ulang lokasi paket pekerjaanya, supaya target indikator dapat tercapai. Laporan kinerja merupakan alat evaluasi sehingga kendala yang muncul dapat dicari solusinya dan menjadi bahan perbaikan kinerja.

Simpang Empat, Januari 2024


Kepala Dinas
ASRI HAMDIL ST

Pembina Tk. 1/ IVb
NIP. 19761123 200501 1 012



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2023
KEPALA DINAS

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ASRI HAMDI, ST**

Jabatan : Kepala Dinas

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama : **H. HAMSUARDI, S. Ag.**

Jabatan : Bupati Pasaman Barat

Selaku atasan PIHAK KESATU, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Simpang Empat, 10 November 2023

PIHAK KEDUA
Bupati Pasaman Barat



H. HAMSUARDI, S. Ag.

PIHAK KESATU
Kepala Dinas



ASRI HAMDI, ST
NIP. 19761123 200501 1 012

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA DINAS

Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat TA. 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Cakupan Layanan Program Pengembangan Perumahan guna Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dibidang Perumahan	Rasio penduduk korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100
		Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	100
2	Berkurangnya Rumah Tidak Layak Huni dan Berkurangnya Luas Kawasan Kumuh	Persentase Areal Kawasan Kumuh	3,39%
		Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	88,39
3	Tersedianya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk menunjang fungsi hunian	Persentase Pengembang Yang Tersertifikasi	60%
		Cakupan Lingkungan Sehat dan aman yang didukung dengan PSU	0,59
4	Meningkatnya Penyelesaian Urusan Pertanahan	Persentase penyelesaian izin lokasi	100%
		Persentase konflik pertanahan difasilitasi	100%
		Jumlah Fasilitasi Ganti Rugi Tanah	2 Angka
5	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	Level Maturitas SPIP Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	2,35
		Nilai SAKIP Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	B
		Penurunan Temuan BPK dan/ atau Inspektorat	75%

No	Program	Anggaran		Keterangan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
1	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Rp 27.091.254.400	Rp 686.767.000	
2	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Rp 1.153.347.500	Rp 2.879.423.000	
3	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Rp 1.756.608.000	Rp 2.044.523.000	
4	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Rp 488.826.124	Rp 2.571.174.627	
5	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Rp 25.050.000	Rp 25.050.000	
6	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Rp 96.173.500	Rp 118.437.500	
7	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI	Rp 22.866.000	Rp 27.321.000	

No	Program	Anggaran		Keterangan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
6	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Rp 96.173.500	Rp 118.437.500	
7	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI	Rp 22.866.000	Rp 27.321.000	
8	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Rp 35.973.000	Rp 49.635.500	
9	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 3.800.534.203	Rp 3.736.150.130	
Jumlah		Rp 34.470.632.727	Rp 12.138.481.757	

Simpang Empat, 10 November 2023

PIHAK KEDUA

Bupati Pasaman Barat

H. HAMSUARDI, S. Ag.



PIHAK KESATU

Kepala Dinas

ASRI HAMDI, ST

NIP. 197611232005011012





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 KEPALA DINAS

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ASRI HAMDI, ST**

Jabatan : Plt. Kepala Dinas

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama : **H. HAMSUARDI, S. Ag.**

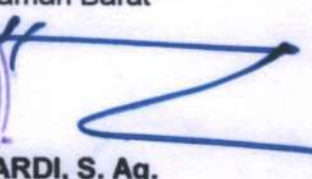
Jabatan : Bupati Pasaman Barat

Selaku atasan PIHAK KESATU, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Simpang Empat, 2 Januari 2023

PIHAK KEDUA
Bupati Pasaman Barat

H. HAMSUARDI, S. Ag.


PIHAK KESATU
Plt. Kepala Dinas

ASRI HAMDI, ST
NIP. 197611232005011012


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

KEPALA DINAS

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat TA. 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Mewujudkan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang layak	Persentase Areal Kawasan Kumuh	2,95%
		Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	91,19
		Persentase Pengembang Yang Tersertifikasi	70%
		Cakupan Lingkungan Sehat dan aman yang didukung dengan PSU	0,78
		Rasio penduduk korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100
		Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	100
2	Pemenuhan penyelesaian konflik pertanahan	Persentase penyelesaian izin lokasi	100%
		Persentase konflik pertanahan difasilitasi	100%
		Jumlah Fasilitasi Ganti Rugi Tanah	12
3	Meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Opini BPK Atas Laporan Keuangan	WTP
		Nilai Sakip	A
		Level Maturitas SPIP	3

	Program	Anggaran	Keterangan
1	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Rp 27.091.254.400	
2	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Rp 1.153.347.500	
3	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Rp 1.756.608.000	
4	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Rp 488.826.124	
5	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Rp 25.050.000	
6	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Rp 96.173.500	
7	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI	Rp 22.866.000	

8	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Rp 35.973.000	
9	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 3.800.534.203	
Jumlah		Rp 34.470.632.727	

Simpang Empat, 2 Januari 2023

PIHAK KEDUA

Bupati Pasaman Barat



H. HAMSUARDI, S. Ag.

PIHAK KESATU

Plt. Kepala Dinas



ASRI HAMDI, ST
NIP. 197611232005011012

RENCANA AKSI PENCAPAIAN TARGET KINERJA

DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN PASAMAN BARAT

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Kegiatan	Rencana Aksi	Target Output Triwulan		Kendala	Tindak Lanjut	Program	Penanggung Jawab	Anggarannya
				I						
1	Terwujudnya Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Layak Huni	Fasilitasi Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat korban bencana	Pendataan dan Verifikasi Data	-				Program Pengembangan Perumahan	Bidang Perumahan	27.091.254.400
		Persentase areal kawasan kumuh	Pembuatan Juknis	-				Program Kawasan Permukiman	Bidang Kawasan Permukiman	1.153.347.500
		Cakupan ketersediaan rumah layak huni	Pembuatan Juknis	-				Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Bidang Perumahan	1.756.608.000
		Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	Pembuatan Juknis	-				Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Bidang Perumahan	488.826.124

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Kegiatan	Rencana Aksi	Target Output Triwulan		Kendala	Tindak Lanjut	Program	Penanggung Jawab	Anggarannya
				I						
		Persentase pengembang yang tersertifikasi	Pembuatan Juknis	-				Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, dan Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Bidang Perumahan	25.050.000
2	Meningkatnya Fasilitas Penyelesaian Konflik Pertanahan	Penyelesaian izin lokasi (%)	Fasilitasi Pembuatan Izin	-				Program Pemberian Izin Lokasi	Bidang Pertanahan	22.866.000
		Persentase konflik pertanahan difasilitasi	Fasilitasi Konflik Pertanahan	-				Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Bidang Pertanahan	96.173.500
		Jumlah fasilitasi ganti rugi tanah	Fasilitasi masalah ganti rugi tanah	-				Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Bidang Pertanahan	35.973.000
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Persentase pelayanan kebutuhan administrasi perkantoran	Fasilitasi kegiatan rutin kantor	Pelaksanaan pengadaan kebutuhan rutin perkantoran dan belanja rutin pegawai				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Sekretariat	3.066.232.513

RENCANA AKSI PENCAPAIAN TARGET KINERJA

DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN PASAMAN BARAT

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Kegiatan	Rencana Aksi	Target Output Triwulan	Kendala	Tindak Lanjut	Program	Penanggung Jawab	Anggarannya
				II					
1	Terwujudnya Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Layak Huni	Fasilitasi Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat korban bencana	Pendataan dan Verifikasi Data	-			Program Pengembangan Perumahan	Bidang Perumahan	27.091.254.400
		Persentase areal kawasan kumuh	Penunjukan pelaksana teknis	-			Program Kawasan Permukiman	Bidang Kawasan Permukiman	1.153.347.500
		Cakupan ketersediaan rumah layak huni	Penunjukan pelaksana teknis	-			Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Bidang Perumahan	1.756.608.000
		Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	Penunjukan pelaksana teknis	-			Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan utilitas Umum (PSU)	Bidang Perumahan	488.826.124

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Kegiatan	Rencana Aksi	Target Output	Kendala	Tindak Lanjut	Program	Penanggung Jawab	Anggarannya
				Triwulan II					
		Persentase pengembangan yang tersertifikasi	Pelaksanaan kegiatan	-			Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Bidang Perumahan	25.050.000
2	Meningkatnya Fasilitas Penyelesaian Konflik Pertanahan	Penyelesaian izin lokasi (%)	Fasilitasi Pembuatan Izin	-			Program Pemberian Izin Lokasi	Bidang Pertanahan	22.866.000
		Persentase konflik pertanahan difasilitasi	Fasilitasi Konflik Pertanahan	-			Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Bidang Pertanahan	96.173.500
		Jumlah fasilitasi ganti rugi tanah	Fasilitasi masalah ganti rugi tanah	-			Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Bidang Pertanahan	35.973.000
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Persentase pelayanan kebutuhan administrasi perkantoran	Fasilitasi kegiatan rutin kantor	Pelaksanaan pengadaan kebutuhan rutin perkantoran dan belanja rutin pegawai			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Sekretariat	3.066.232.513

RENCANA AKSI PENCAPAIAN TARGET KINERJA

DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN PASAMAN BARAT

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Kegiatan	Rencana Aksi	Target Output Triwulan	Kendala	Tindak Lanjut	Program	Penanggung Jawab	Anggarannya
1	Terwujudnya Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Layak Huni	Fasilitasi Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat korban bencana	Pendataan dan Verifikasi Data	III -			Program Pengembangan Perumahan	Bidang Perumahan	27.091.254.400
		Persentase areal kawasan kumuh	Pembuatan Juknis	-			Program Kawasan Permukiman	Bidang Kawasan Permukiman	1.153.347.500
		Cakupan ketersediaan rumah layak huni	Pembuatan Juknis	-			Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Bidang Perumahan	1.756.608.000
		Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	Pembuatan Juknis	-			Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Bidang Perumahan	488.826.124

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Kegiatan	Rencana Aksi	Target Output Triwulan		Kendala	Tindak Lanjut	Program	Penanggung Jawab	Anggarannya
				III						
		Persentase pengembang yang tersertifikasi	Pembuatan Juknis	-				Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Bidang Perumahan	25.050.000
2	Meningkatnya Fasilitas Penyelesaian Konflik Pertanahan	Penyelesaian izin lokasi (%)	Fasilitasi Pembuatan Izin	-				Program Pemberian Izin Lokasi	Bidang Pertanahan	22.866.000
		Persentase konflik pertanahan difasilitasi	Fasilitasi Konflik Pertanahan	-				Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Bidang Pertanahan	96.173.500
		Jumlah fasilitasi ganti rugi tanah	Fasilitasi masalah ganti rugi tanah	-				Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Bidang Pertanahan	35.973.000
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Persentase pelayanan kebutuhan administrasi perkantoran	Fasilitasi kegiatan rutin kantor	Pelaksanaan pengadaan kebutuhan rutin perkantoran dan belanja rutin pegawai				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Sekretariat	3.066.232.513

RENCANA AKSI PENCAPAIAN TARGET KINERJA

DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN PASAMAN BARAT

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Kegiatan	Rencana Aksi	Target Output Triwulan		Kendala	Tindak Lanjut	Program	Penanggung Jawab	Anggarannya
				IV						
1	Meningkatnya Cakupan Layanan Program Pengembangan Perumahan guna Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dibidang Perumahan	Fasilitas Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat korban bencana	Pendataan dan Verifikasi Data	1 Dokumen				Program Pengembangan Perumahan	Bidang Perumahan	686.767.000
2	Berkurangnya Rumah Tidak Layak Huni dan Berkurangnya Luas Kawasan Kumuh	Persentase areal kawasan kumuh		3.39%				Program Kawasan Permukiman	Bidang Kawasan Permukiman	2.879.423.000
		Cakupan ketersediaan rumah layak huni		89.39				Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Bidang Perumahan	2.044.523.000
3	Tersedianya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk menunjang fungsi hunian	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU		0.78				Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Bidang Perumahan	2.571.174.627

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Kegiatan	Rencana Aksi	Target Output Triwulan	Kendala	Tindak Lanjut	Program	Penanggung Jawab	Anggarannya
		Persentase pengembangan yang tersertifikasi		IV 60%			Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Bidang Perumahan	25.050.000
4	Meningkatnya Penyelesaian Urusan Pertanahan	Penyelesaian izin lokasi (%)	Fasilitasi Pembuatan Izin	100%			Program Pemberian Izin Lokasi	Bidang Pertanahan	27.321.000
		Persentase konflik pertanahan difasilitasi	Fasilitasi Konflik Pertanahan	100%			Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Bidang Pertanahan	118.437.500
		Jumlah fasilitasi ganti rugi tanah	Fasilitasi masalah ganti rugi tanah	2 Angka			Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Bidang Pertanahan	49.635.500
5	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Persentase pelayanan kebutuhan administrasi perkantoran	Fasilitasi kegiatan rutin kantor	Pelaksanaan pengadaan kebutuhan rutin perkantoran dan belanja rutin pegawai			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Sekretariat	3.736.150.130

**INDIKATOR KINERJA UTAMA OPD DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN 2021 - 2026**

No.	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA
1.	Meningkatkan Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persentase Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Berkualitas	$\frac{\text{Jumlah Perumahan dan Kawasan Permukiman yang berkualitas}}{\text{Jumlah Perumahan dan Kawasan Permukiman}} \times 100\%$	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	1.1 Meningkatkan Cakupan Layanan Program Pengembangan Perumahan guna Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dibidang Perumahan	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	$\frac{\text{Jumlah rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten}}{\text{Jumlah kebutuhan rumah layak huni bagi masyarakat yang terdampak relokasi program pemerintah kabupaten}} \times 100\%$	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	1.2 Berkurangnya Rumah Tidak Layak Huni dan Berkurangnya Luas Kawasan Kumuh	Rasio penduduk korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	$\frac{\text{Jumlah penduduk korban bencana yang memperoleh rumah layak huni}}{\text{Jumlah penduduk korban bencana}} \times 100\%$	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	1.3 Tersedianya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk menunjang fungsi hunian	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	$\frac{\text{Jumlah rumah layak huni}}{\text{Jumlah seluruh rumah yang ada di wilayah Kabupaten}} \times 100\%$	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
2.	Fasilitasi Penanganan Konflik dan Sengketa Pertanahan 2.1 Meningkatnya Penyelesaian Urusan Pertanahan	Persentase areal kawasan kumuh	$\frac{\text{Luas Kawasan Kumuh}}{\text{Luas Wilayah}} \times 100\%$	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
		Cakupan Linkungan yang sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	$\frac{\text{Luasan Linkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU}}{\text{Total luasan permukiman}} \times 100\%$	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
		Persentase pengembangan yang tersertifikasi	$\frac{\text{Jumlah pengembangan yang tersertifikasi}}{\text{Total Jumlah Pengembangan}} \times 100\%$	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
		Persentase konflik pertanahan difasilitasi	$\frac{\text{Jumlah Konflik Pertanahan Yang Difasilitasi}}{\text{Jumlah Konflik Pertanahan}} \times 100\%$	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
3.	Meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 3.1 Meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Jumlah Fasilitas ganti rugi tanah	$\frac{\text{Angka Mutlak (Jumlah Fasilitas ganti rugi tanah dalam satu tahun anggaran)}}{\text{Jumlah Perumahan dan Pertanahan}} \times 100\%$	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
		Penyelesaian izin lokasi (%)	$\frac{\text{Jumlah Izin Lokasi}}{\text{Jumlah Permohonan Izin Lokasi}} \times 100\%$	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
		Level Maturitas SPIP Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Hasil Penilaian BPKP/ Inspektorat	BPKP/ Inspektorat
		Nilai SAKIP Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Nilai berdasarkan LHE SAKIP OPD oleh Inspektorat	Inspektorat
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Hasil perhitungan survey	Dinas Perumahan/ Bagian Organisasi
		Level Maturitas SPIP Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Hasil Penilaian BPKP/ Inspektorat	BPKP/ Inspektorat
		Nilai SAKIP Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Nilai berdasarkan LHE SAKIP OPD oleh Inspektorat	Inspektorat
		Persentase penurunan temuan BPK dan/ atau Inspektorat	$\frac{\text{Jumlah Temuan BPK dan/atau Inspektorat Tahun n - Jumlah temuan BPK dan/ atau Inspektorat tahun n-1}}{\text{Jumlah temuan BPK dan/ atau Inspektorat Th n-1}} \times 100\%$	OPD/ BPK dan/ atau Inspektorat

Sumber Data : SK Bupati Pasaman Barat Nomor : 100.3.3.2/880/BUP-PASBAR/2023 tentang Perubahan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2021-2026